KEBIJAKAN PUBLIK DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

Teori, Analisis, dan Praktik dalam Manajemen Pendidikan

Sunanto, S.Pd. | Darman Eka Saputra

Editor : Dr. Yulita Rujilestari, S.H., M.H

KEBIJAKAN PUBLIK DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

Teori, analisis, dan Praktik dalam Manajemen Pendidikan

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEBIJAKAN PUBLIK
DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

Teori, Analisis, dan Praktik dalam Manajemen Pendidikan

Sunanto, S.Pd.
Darman Eka Saputra, S.Pd., Gr.

YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA MUSLIM

Kebijakan Publik dan Evaluasi Program Pendidikan: Teori, Analisis, dan Praktik dalam Manajemen Pendidikan

Sunanto, S.Pd.
Darman Eka Saputra, S.Pd., Gr.

Editor:
Dr. Yulita Pujilestari, S.H., M.H.

Desainer:
Hidayatur Rahma

Sumber Gambar Kover:
www.canva.com

Penata Letak:
Wilda Febriani

Proofreader:
Tim YPCM

Ukuran:
x, 142 hlm., 14,5 x 20,5 cm

ISBN:
978-634-219-266-5

Cetakan pertama:
November 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 027/Anggota Luar Biasa/SBA/21
YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM

Jorong Pale, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27554
HP/WA: 0853-6336-7395
Website: www.cendekiamuslim.com
E-mail: cendekiamuslimpress@gmail.com
Marketplace: http://store.cendekiamuslim.or.id/

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **ix**

BAB 1
PENDAHULUAN **1**
A. Pentingnya Kebijakan Publik dalam Pendidikan 1
B. Definisi dan Karakteristik Kebijakan Publik 4
C. Hubungan antara Kebijakan Publik, Regulasi, dan Praktik Pendidikan 6
D. Peran Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat dalam Kebijakan Publik 9
E. Contoh Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia 12

BAB 2
KONSEP DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK **17**
A. Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli 17
B. Landasan Filosofis dan Teoritis Kebijakan Publik 20
C. Model-Model Kebijakan Publik (Rasional, Inkremental, *Mixed Scanning, Advocacy Coalition,* dst.) 22
D. Teori Implementasi Kebijakan: Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up* 25
E. Relevansi Teori Kebijakan Publik terhadap Kebijakan Pendidikan 27

BAB 3
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK 31
A. Identifikasi Masalah dan Agenda *Setting* dalam Pendidikan 31
B. Perumusan Alternatif Kebijakan 34
C. Proses Legitimasi dan Pengambilan Keputusan 36
D. Implementasi Kebijakan Pendidikan 38
E. Monitoring dan *Feedback* Kebijakan 40

BAB 4
JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDIDIKAN 43
A. Kebijakan Distributif, Redistributif, dan Regulatif 43
B. Kebijakan Pendidikan Nasional: UU Sisdiknas, PP Guru dan Dosen, dan Lainnya 46
C. Kebijakan Pendidikan Daerah dan Otonomi Pendidikan 49
D. Kebijakan Kurikulum: Dari Kurikulum 1947 hingga Merdeka Belajar 51
E. Dampak Jenis Kebijakan Publik terhadap Mutu Pendidikan 53

BAB 5
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 57
A. Tujuan dan Manfaat Analisis Kebijakan Publik 57
B. Pendekatan Analisis: Rasional, Politik, Advokasi, dan Evaluatif 59
C. Teknik Analisis: *Cost-Benefit Analysis,* SWOT, *Stakeholder Analysis* 62
D. Peran Analis Kebijakan Pendidikan 64
E. Studi Kasus: Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 67

BAB 6
METODE EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN 71
A. Pengertian Evaluasi Program Pendidikan 71
B. Tujuan dan Manfaat Evaluasi 74
C. Prinsip-Prinsip Evaluasi (Objektivitas, Transparansi, Akuntabilitas) 76
D. Jenis Evaluasi: Formatif, Sumatif, Responsif, dan Lainnya 78
E. Pendekatan Evaluasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan *Mixed Methods* 81

BAB 7
DESAIN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN 85
A. Pentingnya Desain dalam Evaluasi Program 85
B. Desain Eksperimen, Quasi-Eksperimen, dan Non-Eksperimen 87
C. Desain Longitudinal dan *Cross-sectional* 90
D. Penentuan Variabel dan Indikator Keberhasilan Program 92
E. Validitas, Reliabilitas, dan Kredibilitas dalam Evaluasi 94

BAB 8
PENGUMPULAN DATA UNTUK EVALUASI PROGRAM 99
A. Strategi dan Teknik Pengumpulan Data (Kuesioner, Observasi, Wawancara, Dokumentasi) 99
B. Populasi dan Sampel dalam Evaluasi Pendidikan 101
C. Instrumen Evaluasi: Penyusunan dan Uji Validitas . 103
D. Etika dalam Pengumpulan Data Evaluasi 105
E. Studi Kasus: Pengumpulan Data Evaluasi Program Sekolah 107

BAB 9
ANALISIS DATA EVALUASI PROGRAM 111
A. Analisis Kuantitatif: Statistik Deskriptif dan Inferensial 111
B. Analisis Kualitatif: *Coding,* Kategorisasi, dan Analisis Tematik 113
C. Triangulasi Data dalam Evaluasi Pendidikan 116
D. Interpretasi Hasil Evaluasi dan Penyusunan Kesimpulan 118
E. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti 120

BAB 10
CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM 125
A. Struktur Laporan Evaluasi Program Pendidikan 125
B. Penyusunan Ringkasan Eksekutif dan Temuan Utama 127
C. Penyajian Data dan Analisis dalam Laporan 130
D. Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan dan Pengambil Kebijakan 132
E. Contoh Laporan Evaluasi Program BOS/Merdeka Belajar 134

DAFTAR PUSTAKA 137
TENTANG PENULIS 141

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan buku *Kebijakan Publik dan Evaluasi Program Pendidikan: Teori, Analisis, dan Praktik dalam Manajemen Pendidikan* ini.

Kebijakan publik dan evaluasi program pendidikan merupakan dua aspek krusial yang saling terkait dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Buku ini akan menjelaskan proses dalam pembuatan serta bagaimana cara menganalisis kebijakan publik dalam pendidikan. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi para pengelola pendidikan, akademisi, dan semua pihak yang peduli terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga mendorong dialog dan kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penyuntingan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan menjadi langkah awal dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penulis

PENDAHULUAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 1

A. Pentingnya Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan negara modern, termasuk di sektor pendidikan. Pendidikan sebagai hak fundamental warga negara tidak dapat terlepas dari campur tangan negara dalam bentuk kebijakan yang mengatur arah, tujuan, dan strategi pembangunan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan memiliki urgensi tinggi karena menyangkut upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks, mulai dari ketimpangan akses antarwilayah, kualitas guru yang bervariasi, hingga rendahnya daya saing global. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan publik yang terarah, berbasis data, dan memiliki visi jangka panjang. Tanpa kebijakan yang tepat, pendidikan hanya akan berjalan secara administratif tanpa menyentuh substansi peningkatan mutu.

Urgensi kebijakan publik dalam pendidikan juga berkaitan dengan perubahan global. Revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital, dan era masyarakat

informasi menuntut sistem pendidikan yang adaptif. Pemerintah perlu merespons cepat melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.

Kebijakan publik di bidang pendidikan bukan hanya bersifat regulasi formal, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan. Misalnya, kebijakan tentang kurikulum menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah, kebijakan pembiayaan menentukan siapa yang mendapatkan akses, dan kebijakan sertifikasi guru menentukan standar profesionalisme pendidik.

Dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan publik memiliki peran ganda, yakni sebagai instrumen pemerataan dan sebagai alat peningkatan kualitas. Pemerataan diwujudkan dalam kebijakan subsidi pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara peningkatan kualitas tercermin dalam kebijakan pengembangan kurikulum dan kompetensi guru.

Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh, kebijakan zonasi sekolah tidak hanya bertujuan pemerataan akses, tetapi juga mengandung nilai sosial berupa inklusivitas dan keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki implikasi luas yang harus dipertimbangkan secara matang.

Urgensi kebijakan pendidikan juga muncul dari tuntutan internasional. Indonesia sebagai anggota UNESCO dan negara yang terikat pada *Sustainable*

Development Goals (SDGs) memiliki kewajiban melaksanakan target pendidikan berkualitas dan inklusif (SDG 4). Hal ini hanya dapat dicapai dengan perumusan kebijakan pendidikan yang sesuai standar global.

Kebijakan publik dalam pendidikan juga ditentukan oleh kebutuhan pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik bangsa.

Kebijakan publik dalam pendidikan perlu didukung dengan riset dan evaluasi yang memadai. Tanpa dasar data yang kuat, kebijakan berisiko gagal menjawab persoalan yang ada. Oleh sebab itu, urgensi kebijakan pendidikan bukan hanya dalam perumusan, tetapi juga dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan.

Perubahan sosial di Indonesia, seperti urbanisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi, turut mendorong lahirnya kebijakan pendidikan baru. Sebagai contoh, kebijakan Merdeka Belajar merupakan respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan berbasis kompetensi.

Kebijakan publik dalam pendidikan juga harus memperhatikan konteks lokal. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat. Urgensi kebijakan ini terlihat dalam peran dinas pendidikan daerah dalam mengelola sekolah-sekolah di wilayahnya.

Dengan demikian, latar belakang dan urgensi kebijakan publik dalam pendidikan terletak pada fungsinya sebagai alat negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga daya saing bangsa di tingkat global. Tanpa kebijakan yang tepat, pembangunan pendidikan akan stagnan dan tidak mampu membawa perubahan signifikan.

B. Definisi dan Karakteristik Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan kolektif yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya terkait dengan tindakan, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak dalam menghadapi isu tertentu.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, maupun program-program yang bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Dengan kata lain, kebijakan publik di bidang pendidikan menjadi pedoman formal yang mengatur bagaimana layanan pendidikan diberikan kepada masyarakat.

Karakteristik utama kebijakan publik adalah sifatnya yang mengikat seluruh warga negara. Sebuah kebijakan pendidikan, misalnya kurikulum nasional, berlaku bagi seluruh sekolah di Indonesia. Karakteristik lainnya adalah orientasi kebijakan publik pada

kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Kebijakan publik bersifat dinamis karena harus menyesuaikan dengan perubahan zaman, kondisi sosial, politik, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan global.

Kebijakan publik juga memiliki karakteristik hierarkis. Artinya, kebijakan pada tingkat nasional menjadi acuan bagi kebijakan di tingkat daerah, sedangkan kebijakan daerah harus selaras dengan regulasi nasional. Hal ini untuk memastikan kesatuan arah pembangunan pendidikan.

Selain itu, kebijakan publik di bidang pendidikan memiliki karakteristik partisipatif. Proses perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, guru, hingga masyarakat. Partisipasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan publik juga ditandai dengan adanya legitimasi formal. Sebuah kebijakan baru dapat disebut kebijakan publik apabila sudah melalui proses hukum tertentu, seperti pengesahan undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan menteri. Legitimasi ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat pelaksanaannya.

Selain aspek legalitas, kebijakan publik juga bersifat normatif. Hal ini berarti kebijakan tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-

nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam pendidikan, misalnya, kebijakan wajib belajar mencerminkan nilai keadilan sosial dan pemerataan kesempatan.

Kebijakan publik biasanya juga memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dalam bidang pendidikan, tujuan tersebut dapat berupa peningkatan angka partisipasi sekolah, perbaikan mutu pembelajaran, atau peningkatan kompetensi guru. Tujuan ini menjadi dasar dalam merancang evaluasi kebijakan.

Karakteristik kebijakan publik lainnya adalah adanya keterbatasan sumber daya. Pemerintah sering kali harus menyesuaikan kebijakan dengan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Hal ini menjadikan kebijakan publik sebagai kompromi antara idealisme dan realitas.

Dari definisi dan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dalam pendidikan adalah keputusan kolektif pemerintah yang bersifat mengikat, memiliki legitimasi formal, berorientasi pada kepentingan umum, serta bersifat dinamis dan partisipatif, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan.

C. Hubungan antara Kebijakan Publik, Regulasi, dan Praktik Pendidikan

Kebijakan publik dalam pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan regulasi dan praktik pendidikan di lapangan. Kebijakan merupakan payung besar yang memberikan arah, sedangkan regulasi adalah turunan teknis yang memberi detail pelaksanaan. Pada akhirnya, praktik pendidikan di

sekolah atau lembaga pendidikan menjadi arena di mana kebijakan dan regulasi diuji efektivitasnya.

Hubungan ini dapat digambarkan melalui kebijakan kurikulum. Pemerintah pusat merumuskan kebijakan umum kurikulum nasional, kemudian dituangkan dalam regulasi berupa Peraturan Menteri Pendidikan atau Peraturan Pemerintah. Regulasi tersebut memberikan detail teknis seperti struktur mata pelajaran, alokasi jam belajar, hingga standar penilaian. Pada tingkat praktik, guru dan sekolah menafsirkan regulasi tersebut dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kegiatan belajar mengajar.

Tanpa kebijakan, regulasi akan kehilangan arah karena hanya bersifat administratif. Sebaliknya, tanpa regulasi, kebijakan akan sulit diimplementasikan karena tidak memiliki aturan teknis yang jelas. Dengan demikian, kebijakan dan regulasi harus dipandang sebagai dua elemen yang saling melengkapi untuk mewujudkan praktik pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan publik juga memberi legitimasi pada regulasi. Misalnya, kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dituangkan dalam undang-undang menjadi dasar bagi lahirnya berbagai regulasi tentang dana BOS, rekrutmen guru, hingga program kejar paket. Legitimasi ini penting agar regulasi memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Praktik pendidikan yang terjadi di lapangan sering kali menjadi indikator apakah sebuah kebijakan dan regulasi berhasil atau tidak. Jika kebijakan kurikulum menghasilkan pembelajaran yang kaku dan tidak relevan, maka guru dan siswa akan menjadi pihak yang

paling terdampak. Oleh sebab itu, praktik pendidikan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan regulasi.

Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa proses pendidikan tidak dapat hanya dipandang dari sisi kebijakan, tetapi juga dari regulasi dan praktik. Ketiganya membentuk sebuah siklus: kebijakan melahirkan regulasi, regulasi mengarahkan praktik, dan praktik memberikan masukan bagi kebijakan baru. Siklus ini menunjukkan sifat dinamis dari pembangunan pendidikan.

Dalam konteks otonomi daerah, hubungan ini semakin kompleks. Pemerintah pusat membuat kebijakan makro, sementara pemerintah daerah membuat regulasi turunan sesuai kondisi lokal. Praktik pendidikan di sekolah-sekolah daerah menjadi bukti apakah kebijakan nasional benar-benar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan lokal. Jika ada ketidaksesuaian, maka diperlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi antar level pemerintahan.

Hubungan antara kebijakan, regulasi, dan praktik juga dapat dilihat dari perspektif hukum pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi kebijakan dasar yang mengikat, sementara berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri menjadi regulasi yang menjelaskan detailnya. Implementasi di sekolah dan perguruan tinggi menjadi bentuk nyata dari sistem hukum pendidikan tersebut.

Tidak jarang, praktik pendidikan mendorong lahirnya regulasi baru. Misalnya, praktik penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menuntut adanya regulasi terkait pembelajaran daring. Dari sinilah dapat

dilihat bahwa praktik di lapangan bisa menjadi pendorong bagi pembaruan kebijakan publik.

Keterkaitan ketiga elemen ini juga berpengaruh pada keberhasilan program pendidikan. Jika kebijakan jelas, regulasi rinci, dan praktik konsisten, maka hasil pendidikan akan optimal. Namun jika salah satu elemen lemah, misalnya regulasi terlalu birokratis atau praktik tidak sesuai pedoman, maka kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, hubungan kebijakan, regulasi, dan praktik juga harus dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan harus jelas tujuannya, regulasi harus mudah dipahami dan dijalankan, sedangkan praktik pendidikan harus dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka. Hal ini penting agar pembangunan pendidikan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara kebijakan publik, regulasi, dan praktik pendidikan merupakan hubungan yang integral dan saling memengaruhi. Kebijakan memberikan visi, regulasi memberikan instruksi, dan praktik memberikan bukti nyata keberhasilan atau kegagalan. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan.

D. Peran Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat. Peran pemerintah, baik pusat maupun

daerah, adalah sebagai perumus kebijakan utama yang mengatur arah pembangunan pendidikan. Pemerintah menetapkan visi pendidikan nasional, menyusun regulasi, mengalokasikan anggaran, serta melakukan evaluasi kebijakan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki kewenangan membuat kebijakan makro, seperti kurikulum nasional, standar kompetensi lulusan, dan kebijakan sertifikasi guru. Sementara itu, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan memiliki peran dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan konteks lokal, termasuk pengelolaan sekolah, pengangkatan guru, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, menjadi aktor penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik. Kepala sekolah, guru, dosen, dan tenaga kependidikan berperan mengimplementasikan regulasi dalam proses pembelajaran. Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan karena interaksi langsung dengan peserta didik terjadi di lembaga pendidikan.

Guru memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebijakan kurikulum. Mereka harus mampu menafsirkan regulasi kurikulum menjadi perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi guru sebagai pelaksana utama.

Perguruan tinggi juga memegang peran dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan publik. Melalui penelitian, diskusi akademis, dan

publikasi ilmiah, perguruan tinggi dapat menilai efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi berbasis data. Dengan demikian, perguruan tinggi berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Masyarakat, khususnya orang tua dan organisasi sosial, juga berperan penting dalam kebijakan publik di bidang pendidikan. Orang tua mendukung implementasi kebijakan melalui keterlibatan aktif dalam pendidikan anak, sedangkan organisasi masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Peran sektor swasta dan dunia usaha tidak kalah penting. Melalui program *corporate social responsibility* (CSR), dunia usaha dapat mendukung kebijakan pendidikan dengan menyediakan beasiswa, sarana prasarana, atau program pelatihan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah urusan bersama, bukan hanya pemerintah.

Media massa juga menjadi aktor penting dalam kebijakan publik. Media berfungsi sebagai saluran informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat sekaligus sebagai pengawas kritis. Dengan pemberitaan, media dapat membangun opini publik dan menekan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam kebijakan pendidikan.

Selain itu, organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan World Bank memiliki pengaruh terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia. Melalui program bantuan teknis, penelitian, dan pendanaan, mereka turut memengaruhi arah kebijakan, terutama

terkait target pendidikan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan pendidikan semakin dibutuhkan di era demokrasi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali berperan sebagai pengawas independen terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, media, dan organisasi internasional akan menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam pendidikan. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata di lapangan.

Dengan demikian, kebijakan publik dalam pendidikan merupakan hasil kolaborasi multipihak. Pemerintah memimpin, lembaga pendidikan melaksanakan, masyarakat mendukung, dunia usaha berkontribusi, media mengawasi, dan organisasi internasional memberi arah global. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. Contoh Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia

Kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia sangat beragam, mulai dari kebijakan nasional yang berskala makro hingga kebijakan daerah yang bersifat teknis. Salah satu kebijakan publik paling penting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Undang-undang ini menjadi dasar hukum seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan. Program ini kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun pada 2013, yang bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan menengah. Kebijakan ini didukung dengan berbagai regulasi teknis, seperti penyediaan dana BOS dan pembangunan sekolah baru.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan contoh kebijakan publik yang berfokus pada pendanaan pendidikan. Diluncurkan pada tahun 2005, BOS bertujuan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dengan memberikan dana langsung kepada sekolah. Kebijakan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah.

Selain BOS, kebijakan sertifikasi guru juga menjadi contoh penting. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah menetapkan standar kompetensi guru dan memberikan tunjangan sertifikasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan.

Kebijakan kurikulum di Indonesia juga mengalami perubahan signifikan. Dari Kurikulum 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka saat

ini. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan dinamika kebijakan publik yang berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi kebijakan publik yang mendukung pemerataan akses pendidikan melalui pemberian bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu. PIP merupakan implementasi nyata dari prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan.

Selain itu, kebijakan zonasi sekolah yang diperkenalkan pada tahun 2017 bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan dan mengurangi diskriminasi dalam penerimaan siswa baru. Kebijakan ini mendorong siswa untuk bersekolah di dekat tempat tinggal mereka, sehingga menciptakan keberagaman sosial dalam lingkungan sekolah.

Kebijakan pendidikan inklusif juga menjadi langkah penting. Pemerintah mendorong sekolah-sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama teman-temannya. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*).

Di bidang pendidikan tinggi, kebijakan Kampus Merdeka menjadi salah satu inovasi terbaru. Mahasiswa diberikan kesempatan belajar di luar program studi, bahkan di luar kampus, melalui magang, proyek desa, riset, atau wirausaha. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan digitalisasi pendidikan yang semakin gencar setelah pandemi COVID-19 juga menjadi sorotan. Pemerintah meluncurkan platform Merdeka Mengajar,

penyediaan kuota internet untuk siswa dan guru, serta pelatihan pembelajaran daring. Kebijakan ini menunjukkan respons pemerintah terhadap tantangan global.

Berbagai kebijakan publik di bidang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjawab persoalan akses, mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan infrastruktur.

Dengan demikian, contoh-contoh kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Dari BOS, sertifikasi guru, kurikulum, hingga Merdeka Belajar, semua kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

KONSEP DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 2

A. Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Kebijakan publik telah menjadi kajian utama dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik karena menyangkut bagaimana pemerintah merespons persoalan masyarakat. Definisi kebijakan publik sangat beragam, tergantung pada sudut pandang para ahli. Thomas R. Dye misalnya mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya tindakan nyata, tetapi juga pilihan untuk tidak bertindak dalam menghadapi suatu masalah.

James Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Definisi ini menekankan unsur tujuan dan tindakan kolektif. Dengan kata lain, kebijakan publik bukanlah keputusan spontan, melainkan keputusan yang terarah dan memiliki orientasi hasil.

Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan yang diusulkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam pandangan ini, kebijakan publik dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan bukan sekadar produk internal pemerintah.

William N. Dunn menekankan aspek analitis dalam definisi kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling bergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Kebijakan publik dalam hal ini dipandang sebagai produk dari proses politik yang kompleks, di mana berbagai kepentingan bertemu dan berkompetisi.

David Easton menghubungkan kebijakan publik dengan konsep "alokasi nilai." Menurutnya, kebijakan publik merupakan keputusan otoritatif yang mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan sebagai nilai sosial dialokasikan melalui kebijakan yang menentukan siapa yang berhak mengakses, berapa biaya yang dibutuhkan, dan standar kualitas yang ditetapkan.

Dye, Anderson, Friedrich, Dunn, dan Easton mewakili beragam pendekatan dalam memahami kebijakan publik. Ada yang menekankan tindakan pemerintah, ada yang menekankan tujuan, ada pula yang melihatnya dari perspektif distribusi nilai. Semua definisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi hukum, politik, administratif, dan sosial sekaligus.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan formal pemerintah untuk

mengatur sistem pendidikan, mulai dari kurikulum, guru, siswa, hingga sarana dan prasarana. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar adalah bentuk nyata bagaimana pemerintah mengambil keputusan strategis untuk mengubah paradigma pendidikan agar lebih relevan dengan tantangan global.

Definisi kebijakan publik juga tidak terlepas dari aspek kewenangan. Kebijakan publik hanya dapat dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti eksekutif, legislatif, atau lembaga yudikatif tertentu. Artinya, meskipun masyarakat dapat memberi masukan, kebijakan baru dianggap sah bila ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Definisi lain juga menyoroti kebijakan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan publik bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan instrumen untuk mewujudkan visi negara. Dalam pendidikan, tujuan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan daya saing nasional.

Keberagaman definisi kebijakan publik menunjukkan bahwa tidak ada satu perspektif tunggal yang mampu menjelaskan seluruh kompleksitasnya. Namun, dalam kerangka akademis, pemahaman berbagai definisi ini penting agar mahasiswa S-2 Magister Manajemen Pendidikan dapat melihat kebijakan publik dari berbagai perspektif sekaligus.

Dengan memahami definisi menurut para ahli, pembaca dapat menyadari bahwa kebijakan publik adalah produk dari proses yang kompleks, penuh kompromi, dan dinamis. Definisi ini menjadi landasan

teoritis bagi analisis lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan publik bekerja dalam bidang pendidikan.

B. Landasan Filosofis dan Teoritis Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya berakar pada pertimbangan praktis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat. Filsafat politik seperti liberalisme, sosialisme, dan pragmatisme memengaruhi bagaimana kebijakan publik dirancang dan dilaksanakan. Misalnya, liberalisme menekankan kebebasan individu sehingga kebijakan publik diarahkan untuk memberikan ruang partisipasi luas, sedangkan sosialisme lebih menekankan pemerataan akses sehingga kebijakan publik lebih pro kepada kelompok lemah.

Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis kebijakan publik adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi pedoman nilai yang mengarahkan setiap kebijakan, termasuk di bidang pendidikan. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan basis etika bagi kebijakan pendidikan.

Teori politik modern juga memengaruhi kebijakan publik. Teori pluralisme melihat kebijakan publik sebagai hasil tarik menarik antara berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat. Teori elitisme berpendapat bahwa kebijakan ditentukan oleh segelintir elite politik dan ekonomi. Sementara teori institusional menekankan pentingnya lembaga negara dalam menentukan bentuk kebijakan.

Landasan teoritis kebijakan publik juga bersumber dari ilmu administrasi. Teori birokrasi Max

Weber, misalnya, memengaruhi bagaimana kebijakan publik dilaksanakan secara hierarkis dan rasional. Teori manajemen modern menambahkan bahwa kebijakan harus dirumuskan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Selain filsafat dan teori politik, kebijakan publik juga didasarkan pada teori kebijakan itu sendiri. Teori rasional menekankan pengambilan keputusan yang logis berdasarkan data dan analisis. Teori inkremental menekankan kebijakan sebagai proses perubahan kecil yang berkelanjutan. Teori advokasi koalisi melihat kebijakan sebagai hasil dari persaingan koalisi kepentingan yang memiliki ideologi tertentu.

Dalam pendidikan, landasan filosofis dan teoritis kebijakan publik dapat terlihat dalam perdebatan kurikulum. Misalnya, apakah kurikulum harus lebih menekankan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik? Jawaban atas pertanyaan ini dipengaruhi oleh landasan filosofis yang dianut pembuat kebijakan.

Landasan teoritis juga memandu cara mengevaluasi kebijakan. Jika menggunakan pendekatan rasional, maka evaluasi kebijakan akan menekankan efisiensi dan efektivitas. Jika menggunakan pendekatan pluralis, evaluasi akan menekankan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Landasan filosofis yang jelas penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam pendidikan, hal ini berarti kebijakan harus sejalan dengan tujuan mencetak generasi yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berdaya saing global.

Dengan memahami landasan filosofis dan teoritis kebijakan publik, mahasiswa pascasarjana akan lebih kritis dalam menilai apakah sebuah kebijakan konsisten dengan nilai dasar bangsa atau hanya mengikuti kepentingan politik sesaat.

Penting juga untuk menekankan bahwa landasan filosofis dan teoritis tidak bersifat statis. Dalam dunia yang berubah cepat, kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan paradigma dan nilai-nilai baru. Namun demikian, dasar filosofis yang kuat akan menjaga kebijakan tetap pada jalurnya.

Dengan demikian, landasan filosofis dan teoritis kebijakan publik merupakan fondasi penting untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan, termasuk dalam bidang pendidikan.

C. Model-Model Kebijakan Publik (Rasional, Inkremental, *Mixed Scanning, Advocacy Coalition,* dst.)

Dalam studi kebijakan publik, berbagai model telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan. Model-model ini berfungsi sebagai kerangka analisis yang membantu peneliti dan praktisi memahami dinamika pembuatan kebijakan. Salah satu model yang paling terkenal adalah model rasional, yang mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan akan memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis data dan perhitungan untung rugi.

Model rasional berangkat dari premis bahwa kebijakan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan logis dan objektif. Pembuat kebijakan diandaikan

memiliki informasi lengkap tentang semua alternatif, biaya, dan manfaat. Namun dalam kenyataannya, informasi sering kali terbatas, sehingga model rasional sulit diterapkan secara sempurna. Meski demikian, model ini tetap menjadi acuan ideal dalam pengambilan keputusan publik.

Sebagai alternatif dari model rasional, Charles Lindblom memperkenalkan model inkremental atau "*the science of muddling through*." Model ini menekankan bahwa kebijakan publik umumnya merupakan hasil dari perubahan kecil yang bertahap, bukan keputusan besar yang radikal. Model inkremental dianggap lebih realistis karena mencerminkan keterbatasan informasi dan kapasitas pemerintah.

Model *mixed scanning* yang diperkenalkan Amitai Etzioni mencoba menggabungkan pendekatan rasional dan inkremental. Dalam model ini, kebijakan dirumuskan dengan memadukan analisis menyeluruh terhadap gambaran besar dan penyesuaian bertahap pada detail kebijakan. Model ini dianggap lebih fleksibel karena dapat menyeimbangkan idealisme dengan realitas politik dan administratif.

Model *advocacy coalition framework* (ACF) dikembangkan oleh Paul Sabatier dan Jenkins-Smith. Model ini menekankan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antar koalisi aktor yang memiliki keyakinan dan kepentingan tertentu. Dalam jangka panjang, koalisi yang lebih kuat atau dominan akan memengaruhi arah kebijakan. Model ini banyak digunakan untuk menjelaskan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Selain model-model tersebut, terdapat pula model institusional yang menekankan peran lembaga formal dalam pembentukan kebijakan. Model politik melihat kebijakan sebagai hasil negosiasi dan kompromi antar aktor politik. Model sistem yang dikembangkan David Easton menggambarkan kebijakan sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan dan dukungan dari lingkungan eksternal.

Dalam bidang pendidikan, model inkremental sering terlihat dalam perubahan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum tidak pernah dilakukan secara drastis, melainkan melalui revisi bertahap. Model *advocacy coalition* juga terlihat dalam kebijakan Merdeka Belajar, di mana koalisi antara akademisi, birokrat, dan praktisi pendidikan mendorong lahirnya kebijakan tersebut.

Model-model kebijakan publik ini tidak saling meniadakan, melainkan dapat saling melengkapi. Dalam praktiknya, pembuat kebijakan dapat menggunakan pendekatan rasional dalam tahap perencanaan, tetapi mengadopsi pendekatan inkremental dalam implementasi.

Pemahaman terhadap model kebijakan publik membantu mahasiswa pascasarjana melihat bahwa kebijakan bukan hanya hasil logika rasional, tetapi juga hasil dari dinamika sosial, politik, dan kelembagaan. Dengan demikian, analisis kebijakan akan lebih komprehensif jika menggunakan kombinasi model.

Kritik terhadap model-model kebijakan publik juga penting diperhatikan. Misalnya, model rasional sering dianggap terlalu idealis, sementara model inkremental dianggap terlalu konservatif. Namun

perbedaan ini justru memperkaya studi kebijakan publik karena menunjukkan beragam perspektif dalam memahami proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, model-model kebijakan publik memberikan kerangka konseptual yang membantu menjelaskan kompleksitas proses kebijakan. Dalam konteks pendidikan, model ini dapat menjadi alat analisis untuk memahami dinamika perumusan kurikulum, pendanaan, maupun kebijakan pengembangan guru.

D. Teori Implementasi Kebijakan: Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*

Implementasi kebijakan merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan membawa hasil jika gagal diimplementasikan. Untuk memahami proses ini, para ahli mengembangkan teori implementasi dengan dua pendekatan utama: *top-down* dan *bottom-up.*

Pendekatan *top-down* melihat implementasi sebagai proses hierarkis di mana perintah dari pembuat kebijakan di tingkat atas dijalankan oleh birokrasi di tingkat bawah. Model ini menekankan kepatuhan pelaksana terhadap tujuan, peraturan, dan instruksi yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi diukur dari sejauh mana pelaksana mampu mengikuti perintah dengan konsisten.

Kelebihan pendekatan *top-down* adalah adanya kejelasan arah dan kontrol yang kuat. Namun kelemahannya adalah kurang memperhatikan kondisi lokal dan pengalaman pelaksana di lapangan. Akibatnya, kebijakan sering kali gagal karena tidak sesuai dengan

realitas yang dihadapi guru, kepala sekolah, atau masyarakat.

Sebagai respons, muncul pendekatan *bottom-up* yang menekankan peran aktor di tingkat lokal dalam menentukan keberhasilan implementasi. Dalam model ini, pelaksana kebijakan seperti guru dan kepala sekolah dianggap memiliki otonomi dan kreativitas untuk menafsirkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Implementasi dilihat sebagai proses interaksi, bukan sekadar eksekusi instruksi.

Pendekatan *bottom-up* lebih fleksibel karena mengakui adanya variasi kondisi di setiap daerah atau sekolah. Namun kelemahannya adalah berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antar wilayah. Misalnya, implementasi kurikulum bisa sangat berbeda antar daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas.

Dalam praktiknya, banyak negara menggabungkan kedua pendekatan ini. Pemerintah pusat tetap memberikan arahan umum melalui kebijakan nasional, tetapi memberikan ruang bagi pelaksana di tingkat lokal untuk menyesuaikan implementasi sesuai konteks. Pendekatan hibrida ini sering disebut kombinasi *top-down* dan *bottom-up.*

Di Indonesia, contoh pendekatan *top-down* terlihat pada kebijakan sertifikasi guru, di mana aturan dan prosedur ditentukan secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara pendekatan *bottom-up* terlihat pada program sekolah penggerak yang memberi ruang inovasi kepada sekolah dalam mengembangkan pembelajaran.

Teori implementasi juga mengajarkan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika komunikasi antar level pemerintahan buruk atau sumber daya tidak memadai, maka implementasi kebijakan berpotensi gagal.

Selain top-down dan *bottom-up*, muncul pula teori *street-level bureaucracy* yang dikemukakan Michael Lipsky. Teori ini menekankan bahwa pelaksana di garis depan, seperti guru dan tenaga kependidikan, memiliki kekuasaan besar dalam menentukan bagaimana kebijakan benar-benar dijalankan.

Dengan memahami teori implementasi kebijakan, mahasiswa pascasarjana dapat menilai apakah kegagalan sebuah kebijakan disebabkan oleh desain yang buruk atau implementasi yang tidak efektif. Hal ini penting karena banyak kebijakan pendidikan di Indonesia gagal bukan karena ide dasarnya salah, tetapi karena pelaksanaannya lemah.

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan memberikan kerangka penting untuk memahami dinamika antara pembuat kebijakan, birokrasi, dan pelaksana di lapangan. Kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* menjadi pilihan realistis dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang kompleks.

E. Relevansi Teori Kebijakan Publik terhadap Kebijakan Pendidikan

Teori kebijakan publik memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Relevansi teori kebijakan publik terhadap

pendidikan terlihat jelas karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling banyak diatur oleh kebijakan pemerintah.

Model rasional, misalnya, relevan ketika pemerintah merancang kurikulum baru dengan memperhitungkan data kompetensi siswa, kebutuhan dunia kerja, dan standar internasional. Namun karena keterbatasan informasi, model inkremental lebih sering terjadi, seperti perubahan bertahap dalam kurikulum atau regulasi guru.

Teori pluralisme juga relevan karena kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh banyak kepentingan, termasuk pemerintah, guru, orang tua, siswa, organisasi profesi, dan dunia usaha. Kebijakan sertifikasi guru, misalnya, lahir dari tarik menarik antara kepentingan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kepentingan guru untuk mendapatkan kesejahteraan.

Pendekatan *advocacy coalition framework* juga berguna untuk menjelaskan mengapa kebijakan pendidikan tertentu bertahan lama meskipun mendapat kritik. Koalisi antara birokrat, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat mempertahankan kebijakan yang mereka yakini penting.

Teori implementasi *top-down* relevan untuk kebijakan yang membutuhkan standar nasional, seperti ujian nasional atau akreditasi sekolah. Namun teori *bottom-up* lebih relevan untuk kebijakan yang membutuhkan inovasi lokal, seperti program sekolah penggerak atau kurikulum muatan lokal.

Relevansi teori kebijakan publik juga terlihat dalam evaluasi program pendidikan. Teori evaluasi berbasis rasional mendorong penggunaan indikator

kuantitatif seperti angka partisipasi sekolah atau nilai ujian. Sementara pendekatan kualitatif lebih memperhatikan pengalaman siswa dan guru dalam menghadapi kebijakan.

Dengan memahami teori kebijakan publik, praktisi pendidikan dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang ada. Mereka tidak hanya menerima kebijakan secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis apakah kebijakan tersebut rasional, adil, partisipatif, dan sesuai dengan konteks lokal.

Bagi mahasiswa pascasarjana, relevansi teori kebijakan publik penting untuk mengembangkan kemampuan analisis akademis. Mereka dapat menggunakan teori untuk menulis penelitian, mengevaluasi program, atau memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Selain itu, teori kebijakan publik membantu menghubungkan pendidikan dengan sektor lain. Misalnya, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Teori kebijakan publik mengajarkan bahwa pendidikan adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Relevansi teori kebijakan publik juga semakin kuat di era globalisasi. Indonesia harus menyesuaikan kebijakan pendidikannya dengan standar internasional, seperti SDGs. Dalam hal ini, teori kebijakan publik menjadi alat analisis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional selaras dengan komitmen global.

Dengan demikian, teori kebijakan publik tidak hanya penting dalam ranah akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam merumuskan,

melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Melalui teori ini, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 3

A. Identifikasi Masalah dan Agenda *Setting* dalam Pendidikan

Proses pembuatan kebijakan publik dalam pendidikan selalu diawali dengan identifikasi masalah. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu memahami persoalan utama yang dihadapi dunia pendidikan. Identifikasi masalah ini menjadi dasar agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Masalah pendidikan di Indonesia dapat mencakup rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan akses antarwilayah, atau rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa.

Identifikasi masalah dilakukan melalui berbagai metode, seperti penelitian akademis, survei nasional, laporan media, atau masukan langsung dari masyarakat. Misalnya, hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang menempatkan Indonesia pada posisi rendah dalam literasi dan numerasi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan kurikulum baru.

Agenda *setting* merupakan tahap berikutnya setelah masalah teridentifikasi. Tidak semua masalah dapat langsung menjadi agenda kebijakan, hanya masalah tertentu yang dianggap prioritas dan mendapat perhatian pemerintah. Agenda *setting* dipengaruhi oleh

kekuatan politik, tekanan publik, serta urgensi masalah tersebut.

Dalam bidang pendidikan, agenda *setting* dapat dipengaruhi oleh peristiwa besar, seperti pandemi COVID-19 yang membuat pembelajaran daring menjadi prioritas kebijakan. Kondisi darurat tersebut mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan.

Proses agenda *setting* juga dipengaruhi oleh aktor-aktor tertentu, seperti kementerian, lembaga legislatif, organisasi guru, maupun media massa. Mereka dapat memperkuat atau melemahkan isu tertentu agar masuk dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, agenda *setting* bukan hanya persoalan rasional, tetapi juga politis.

Salah satu tantangan dalam agenda *setting* adalah memastikan bahwa masalah yang diangkat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan elite tertentu. Misalnya, jika agenda kebijakan hanya fokus pada peningkatan fasilitas sekolah elite, maka isu pemerataan akses bagi sekolah terpencil dapat terabaikan.

Agenda *setting* juga memiliki dimensi waktu. Masalah yang awalnya tidak dianggap penting dapat berubah menjadi isu utama ketika mendapat perhatian publik. Misalnya, isu kekerasan di sekolah yang sebelumnya dipandang sebagai kasus individual, berubah menjadi agenda kebijakan nasional setelah marak diberitakan media.

Dalam pendidikan, agenda *setting* sering kali terkait dengan kebutuhan jangka panjang. Misalnya, isu bonus demografi mendorong lahirnya kebijakan

pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Dengan kata lain, agenda kebijakan pendidikan bukan hanya merespons masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan.

Identifikasi masalah yang baik harus berbasis data. Pemerintah perlu mengandalkan hasil riset, data statistik, dan evaluasi program sebelumnya. Tanpa data yang valid, kebijakan pendidikan berisiko salah arah dan tidak efektif.

Agenda *setting* juga memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi publik dalam mengidentifikasi masalah dapat membuat kebijakan lebih relevan. Forum musyawarah pendidikan di daerah, misalnya, dapat menjadi sarana masyarakat menyuarakan masalah yang mereka hadapi.

Hubungan antara identifikasi masalah dan agenda *setting* sangat erat. Masalah yang tidak teridentifikasi dengan baik tidak akan masuk dalam agenda kebijakan, sementara masalah yang tidak masuk agenda kebijakan cenderung terabaikan. Oleh karena itu, kedua tahap ini menjadi fondasi utama dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, identifikasi masalah dan agenda *setting* dalam pendidikan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan kebijakan publik. Tanpa fondasi yang kuat, kebijakan yang dibuat berisiko tidak menyentuh akar persoalan dan hanya menjadi solusi sementara.

B. Perumusan Alternatif Kebijakan

Setelah masalah berhasil diidentifikasi dan masuk dalam agenda kebijakan, tahap berikutnya adalah perumusan alternatif kebijakan. Tahap ini merupakan proses analitis di mana berbagai pilihan solusi disusun dan dibandingkan. Pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada satu solusi, tetapi harus mempertimbangkan berbagai alternatif agar kebijakan yang dipilih benar-benar efektif.

Perumusan alternatif kebijakan biasanya melibatkan tim ahli, akademisi, birokrat, dan pemangku kepentingan terkait. Mereka melakukan analisis mendalam tentang kelebihan, kekurangan, biaya, serta dampak jangka panjang dari setiap alternatif. Dengan demikian, kebijakan yang dipilih bukan hasil intuisi semata, melainkan melalui kajian yang matang.

Dalam pendidikan, contoh perumusan alternatif kebijakan dapat terlihat dalam reformasi kurikulum. Pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa opsi: mempertahankan kurikulum lama, melakukan revisi kecil, atau mengganti total dengan kurikulum baru. Setiap opsi memiliki konsekuensi berbeda dalam hal biaya, kesiapan guru, serta dampaknya pada siswa.

Perumusan alternatif juga memperhatikan kelayakan politik. Alternatif yang ideal secara akademis belum tentu dapat diterima secara politik. Misalnya, kebijakan penghapusan ujian nasional mendapat dukungan sebagian kelompok, tetapi juga mendapat penolakan dari pihak lain. Oleh karena itu, aspek politik menjadi pertimbangan penting dalam memilih alternatif.

Selain politik, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama. Alternatif kebijakan pendidikan harus realistis sesuai dengan ketersediaan anggaran. Sebuah program peningkatan mutu guru dengan biaya sangat besar mungkin tidak dapat dilaksanakan jika keuangan negara terbatas.

Perumusan alternatif juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Misalnya, kebijakan pendidikan karakter harus sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal agar diterima masyarakat. Tanpa pertimbangan ini, kebijakan berpotensi ditolak oleh masyarakat karena dianggap bertentangan dengan nilai yang mereka anut.

Metode analisis kebijakan, seperti *cost-benefit analysis,* analisis SWOT, atau analisis multikriteria, dapat digunakan untuk menilai alternatif kebijakan. Dengan pendekatan ini, setiap alternatif dapat dievaluasi secara sistematis dan obyektif.

Proses perumusan alternatif juga harus partisipatif. Guru, siswa, orang tua, dan masyarakat perlu dilibatkan agar alternatif yang dipilih tidak hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah. Partisipasi ini meningkatkan legitimasi kebijakan yang akan diputuskan.

Dalam praktiknya, perumusan alternatif kebijakan sering menghasilkan kompromi. Misalnya, pemerintah tidak memilih alternatif yang paling radikal, melainkan yang paling realistis dan dapat diterima banyak pihak. Kompromi ini sering kali menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Perumusan alternatif juga merupakan tahap di mana inovasi dapat dimunculkan. Misalnya, dalam menghadapi pandemi, alternatif pembelajaran daring

muncul sebagai solusi baru yang sebelumnya tidak diprioritaskan. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan alternatif harus terbuka terhadap ide-ide inovatif.

Keberhasilan tahap ini sangat menentukan kualitas kebijakan. Alternatif yang buruk akan menghasilkan kebijakan yang lemah, sementara alternatif yang tepat akan melahirkan kebijakan yang kuat dan efektif.

Dengan demikian, perumusan alternatif kebijakan adalah tahap strategis dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam pendidikan, tahap ini menentukan apakah kebijakan mampu menjawab persoalan secara komprehensif atau hanya menjadi solusi sementara.

C. Proses Legitimasi dan Pengambilan Keputusan

Setelah alternatif kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya adalah proses legitimasi dan pengambilan keputusan. Legitimasi adalah proses formal di mana kebijakan mendapatkan pengesahan dari lembaga yang berwenang, seperti eksekutif, legislatif, atau lembaga yudikatif. Tanpa legitimasi, kebijakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, legitimasi kebijakan dapat berupa undang-undang yang disahkan DPR, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Misalnya, kebijakan wajib belajar memiliki legitimasi melalui UU Sisdiknas, sementara kebijakan kurikulum biasanya diatur melalui peraturan menteri.

Legitimasi penting karena memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan. Tanpa legitimasi,

kebijakan hanya menjadi wacana atau program sementara tanpa kepastian pelaksanaan. Legitimasi juga memberi kepastian bagi masyarakat bahwa kebijakan tersebut sah dan harus ditaati.

Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik sering kali melibatkan perdebatan panjang. Alternatif kebijakan yang telah dirumuskan akan diperdebatkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat. Proses ini mencerminkan sifat demokratis dalam pembuatan kebijakan.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan tidak selalu rasional murni. Faktor politik sering memengaruhi keputusan akhir. Misalnya, alternatif kebijakan yang paling efektif mungkin ditolak karena tidak populer secara politik, sedangkan alternatif lain yang lebih populis dipilih meski kurang efektif.

Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kekuatan lobi dan kepentingan kelompok tertentu. Organisasi guru, misalnya, dapat memengaruhi keputusan terkait sertifikasi guru atau tunjangan profesi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah hasil interaksi kompleks antara aktor-aktor dengan kepentingan berbeda.

Dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang partisipatif sangat penting. Jika kebijakan hanya diputuskan oleh pemerintah tanpa melibatkan guru dan masyarakat, maka implementasi akan menghadapi resistensi. Oleh karena itu, konsultasi publik dan uji coba kebijakan sering dilakukan sebelum keputusan final diambil.

Legitimasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Dengan adanya legitimasi formal, kebijakan dapat diawasi oleh lembaga hukum, media, dan masyarakat. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan.

Proses legitimasi juga menegaskan bahwa kebijakan publik bukan hanya produk eksekutif, tetapi juga bagian dari sistem hukum negara. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang sah akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan lain.

Keputusan yang diambil pada tahap ini akan menentukan arah kebijakan pendidikan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berbasis data.

Dengan demikian, legitimasi dan pengambilan keputusan adalah tahap penting yang memberi kebijakan kekuatan hukum dan politik. Tanpa legitimasi, kebijakan tidak akan efektif, dan tanpa keputusan yang tepat, kebijakan tidak akan mampu menjawab persoalan pendidikan yang ada.

D. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan dilaksanakan di lapangan. Tahap ini merupakan ujian nyata dari efektivitas kebijakan, karena di sinilah kebijakan berinteraksi dengan guru, siswa, sekolah, dan masyarakat.

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga

orang tua. Keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi yang baik antar aktor-aktor tersebut.

Salah satu faktor utama dalam implementasi adalah ketersediaan sumber daya. Kebijakan pendidikan memerlukan anggaran, tenaga, sarana, dan prasarana. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas.

Komunikasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi. Instruksi kebijakan dari pemerintah pusat harus jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana di daerah. Ketidakjelasan komunikasi dapat menyebabkan kebingungan dan salah tafsir dalam pelaksanaan kebijakan.

Disposisi atau sikap pelaksana juga berpengaruh besar. Jika guru dan kepala sekolah memiliki sikap positif terhadap kebijakan, maka implementasi akan berjalan lebih baik. Sebaliknya, jika mereka merasa kebijakan tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka resistensi dapat muncul.

Struktur birokrasi juga menentukan keberhasilan implementasi. Birokrasi yang terlalu rumit dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur yang sederhana dan jelas akan mempermudah pelaksanaan.

Contoh implementasi kebijakan pendidikan dapat dilihat dari program BOS. Pemerintah pusat menyalurkan dana ke sekolah, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan operasional. Keberhasilan program ini bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan manajemen sekolah.

Implementasi kebijakan kurikulum juga menjadi contoh penting. Kurikulum yang baru akan berhasil jika guru mendapatkan pelatihan yang memadai dan sumber daya pendukung tersedia. Tanpa itu, kurikulum hanya akan menjadi dokumen formal yang sulit diterapkan di kelas.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering menghadapi hambatan, seperti keterbatasan anggaran, resistensi pelaksana, atau kesenjangan infrastruktur. Oleh karena itu, implementasi perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala.

Implementasi kebijakan pendidikan juga harus adaptif. Jika ada hambatan di lapangan, pelaksana perlu diberi ruang untuk menyesuaikan tanpa keluar dari tujuan utama kebijakan. Fleksibilitas ini penting agar kebijakan tetap relevan dengan kondisi lokal.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan adalah tahap krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Implementasi yang baik membutuhkan sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung.

E. Monitoring dan *Feedback* Kebijakan

Tahap terakhir dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah monitoring dan *feedback.* Monitoring adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan *feedback* adalah umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan.

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan, monitoring dapat berupa inspeksi sekolah, evaluasi program, atau laporan penggunaan anggaran. Monitoring ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Feedback merupakan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan. *Feedback* dapat bersifat positif maupun negatif. *Feedback* positif menunjukkan bahwa kebijakan berjalan dengan baik, sementara *feedback* negatif menunjukkan adanya masalah yang perlu diperbaiki.

Dalam pendidikan, *feedback* dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti guru, siswa, orang tua, media, atau penelitian akademis. Misalnya, hasil ujian nasional dapat menjadi *feedback* tentang efektivitas kebijakan kurikulum.

Monitoring dan *feedback* juga penting untuk mencegah penyimpangan. Jika tidak ada pengawasan, kebijakan berisiko disalahgunakan, terutama terkait dengan anggaran pendidikan yang besar. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus berjalan efektif.

Feedback juga memungkinkan kebijakan untuk berkembang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat direvisi berdasarkan masukan dari pelaksana di lapangan. Misalnya, kebijakan zonasi sekolah mengalami revisi setelah mendapat kritik dari masyarakat.

Monitoring juga dapat dilakukan melalui evaluasi berkala. Evaluasi formatif dilakukan selama kebijakan berjalan untuk perbaikan langsung, sedangkan evaluasi

sumatif dilakukan setelah kebijakan selesai untuk menilai hasil keseluruhan.

Peran masyarakat sangat penting dalam *feedback*. Partisipasi publik dalam memberikan masukan membuat kebijakan lebih akuntabel dan responsif. Forum diskusi, survei publik, atau media sosial dapat menjadi sarana *feedback* yang efektif.

Feedback juga menjadi dasar untuk agenda *setting* baru. Masalah yang muncul dari *feedback* dapat diidentifikasi sebagai isu baru yang perlu ditangani dalam kebijakan berikutnya. Dengan demikian, siklus kebijakan menjadi berkelanjutan.

Monitoring dan *feedback* juga memperlihatkan bahwa kebijakan publik bukanlah produk final, melainkan proses yang dinamis. Kebijakan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari masyarakat.

Dengan demikian, monitoring dan *feedback* merupakan tahap penting dalam memastikan kebijakan publik benar-benar mencapai tujuannya. Tanpa pengawasan dan masukan, kebijakan hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata di masyarakat.

JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDIDIKAN

BAB 4

A. Kebijakan Distributif, Redistributif, dan Regulatif

Kebijakan publik dalam pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu kebijakan distributif, redistributif, dan regulatif. Pembagian ini membantu dalam memahami orientasi serta dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kebijakan distributif biasanya terkait dengan penyediaan sumber daya bagi masyarakat secara luas, kebijakan redistributif menyangkut pergeseran alokasi sumber daya dari satu kelompok ke kelompok lain, sedangkan kebijakan regulatif berhubungan dengan aturan yang mengatur perilaku lembaga maupun individu dalam bidang pendidikan.

Kebijakan distributif dalam pendidikan bertujuan memperluas akses dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Contohnya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan penyediaan beasiswa. Kebijakan ini bersifat positif karena menambah kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Sebaliknya, kebijakan redistributif cenderung lebih sensitif karena melibatkan transfer sumber daya

dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Dalam pendidikan, redistribusi dapat terlihat dalam kebijakan afirmasi bagi daerah tertinggal, siswa miskin, atau kelompok minoritas. Contohnya adalah kuota penerimaan mahasiswa baru untuk anak Papua di perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini sering kali menimbulkan perdebatan, namun memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial.

Kebijakan regulatif berfokus pada pengaturan standar, prosedur, dan tata kelola pendidikan. Regulasi seperti standar kompetensi guru, peraturan akreditasi sekolah, dan sistem ujian nasional merupakan contoh kebijakan regulatif. Fungsi utama regulasi adalah menjaga agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai aturan, standar mutu, dan prinsip akuntabilitas.

Kebijakan distributif biasanya lebih mudah diterima masyarakat karena membawa manfaat langsung. Sebaliknya, kebijakan redistributif lebih menantang karena bisa menimbulkan resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan. Misalnya, penerapan sistem zonasi sekolah dianggap merugikan kelompok yang terbiasa mendaftarkan anak mereka ke sekolah favorit.

Kebijakan regulatif sering dianggap sebagai kebijakan yang netral, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Misalnya, penerapan standar nasional pendidikan sering dikritik karena kurang memperhatikan kondisi lokal dan perbedaan kapasitas antar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dalam pendidikan harus fleksibel namun tetap menjaga mutu.

Dalam praktik di Indonesia, ketiga jenis kebijakan ini sering berjalan bersamaan. Misalnya, kebijakan BOS (distributif) diiringi dengan aturan penggunaan dana (regulatif) serta keberpihakan lebih besar pada sekolah miskin (redistributif). Dengan demikian, satu kebijakan dapat mengandung lebih dari satu karakteristik.

Perbedaan jenis kebijakan ini juga memengaruhi strategi implementasi. Kebijakan distributif memerlukan sistem distribusi yang adil dan transparan, kebijakan redistributif membutuhkan komunikasi dan sosialisasi yang baik untuk menghindari konflik, sedangkan kebijakan regulatif memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar kepatuhan dapat terjaga.

Kebijakan distributif dan redistributif biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi. Pada masa krisis ekonomi, misalnya, pemerintah akan lebih banyak mengeluarkan kebijakan redistributif untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam pendidikan, hal ini bisa berupa bantuan khusus untuk siswa miskin atau subsidi biaya sekolah.

Jenis kebijakan juga mencerminkan nilai yang dianut suatu negara. Negara yang menekankan keadilan sosial cenderung lebih banyak membuat kebijakan redistributif, sedangkan negara yang menekankan efisiensi akan lebih banyak menerapkan kebijakan regulatif. Indonesia berusaha menyeimbangkan ketiganya, meskipun tantangan implementasi masih besar.

Dengan memahami jenis kebijakan publik ini, mahasiswa pascasarjana dan praktisi pendidikan dapat lebih kritis menilai orientasi dan dampak kebijakan. Mereka dapat membedakan mana kebijakan yang

berfokus pada distribusi sumber daya, mana yang berupaya mengoreksi ketidakadilan, dan mana yang bertujuan menjaga standar mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, ketiga jenis kebijakan ini memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Kebijakan distributif memperluas akses, kebijakan redistributif mewujudkan keadilan, dan kebijakan regulatif menjaga mutu. Keseimbangan antara ketiganya menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

B. Kebijakan Pendidikan Nasional: UU Sisdiknas, PP Guru dan Dosen, dan Lainnya

Kebijakan pendidikan nasional di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU ini menjadi payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek pendidikan, mulai dari tujuan, penyelenggaraan, pendanaan, hingga evaluasi.

UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. UU ini juga mengatur tentang jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dengan demikian, pendidikan nasional di Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas.

Selain UU Sisdiknas, terdapat regulasi lain yang menjadi landasan kebijakan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini mengatur tentang hak, kewajiban, kompetensi, kualifikasi, serta kesejahteraan guru dan dosen. Regulasi ini penting karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik.

Peraturan Pemerintah (PP) juga memainkan peran penting dalam kebijakan pendidikan. PP tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Standar ini menjadi acuan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain PP, Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri juga turut memperkuat kebijakan pendidikan. Misalnya, Perpres tentang program Indonesia Pintar dan Permendikbud tentang kurikulum. Peraturan ini bersifat lebih teknis dan langsung berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah.

Kebijakan pendidikan nasional juga diwarnai dengan keberadaan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Meski demikian, arah kebijakan nasional tetap menjadi acuan utama agar terjadi keseragaman dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan afirmasi untuk mendukung kelompok tertentu. Misalnya, kebijakan khusus untuk pendidikan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T). Kebijakan ini

memperlihatkan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan.

Kebijakan pendidikan nasional juga mencakup pembiayaan. Undang-Undang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan ini menjadi dasar bagi berbagai program pendidikan, termasuk BOS, beasiswa, dan pengembangan sarana prasarana sekolah.

Selain aspek hukum, kebijakan pendidikan nasional juga dipengaruhi oleh arah pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi pedoman bagi kementerian dalam merumuskan kebijakan pendidikan. RPJMN memuat target pencapaian mutu, akses, dan relevansi pendidikan sesuai visi pembangunan nasional.

Kebijakan pendidikan nasional juga merespons tantangan global. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung sejak 2019 merupakan respons terhadap kebutuhan dunia kerja yang berubah cepat dan perkembangan teknologi digital. Kebijakan ini menekankan fleksibilitas kurikulum, otonomi sekolah, dan peningkatan kompetensi guru.

Penting dicatat bahwa kebijakan pendidikan nasional di Indonesia sering kali dinamis. Perubahan regulasi dan program terjadi seiring pergantian pemerintahan atau munculnya tantangan baru. Dinamika ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan selalu berada dalam proses adaptasi.

Dengan memahami kebijakan pendidikan nasional, mahasiswa dan praktisi pendidikan dapat melihat arah pembangunan pendidikan di Indonesia. Pengetahuan ini penting agar mereka mampu

berkontribusi secara aktif, baik dalam implementasi kebijakan maupun dalam memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

C. Kebijakan Pendidikan Daerah dan Otonomi Pendidikan

Otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di wilayahnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kebijakan pendidikan daerah mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sekolah, rekrutmen dan distribusi guru, penyediaan sarana prasarana, serta pengawasan mutu. Pemerintah daerah berperan langsung dalam memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya dapat berfungsi dengan baik.

Salah satu kebijakan penting di daerah adalah penerapan kurikulum muatan lokal. Daerah diberi kewenangan untuk menambahkan konten kurikulum yang sesuai dengan kearifan lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, pendidikan bahasa daerah, budaya lokal, atau keterampilan khas daerah.

Otonomi pendidikan juga memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi kebijakan. Beberapa daerah berhasil mengimplementasikan program beasiswa lokal, sekolah unggulan, atau

digitalisasi sekolah sesuai kapasitas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat mendorong kreativitas dalam pengelolaan pendidikan.

Namun, kebijakan pendidikan daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan kapasitas antara daerah maju dan daerah tertinggal. Daerah dengan sumber daya melimpah mampu mengembangkan pendidikan lebih baik, sementara daerah miskin sering kesulitan memenuhi standar nasional.

Kebijakan rekrutmen guru juga menjadi masalah di tingkat daerah. Banyak daerah mengalami kelebihan guru di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil. Kebijakan distribusi guru sering kali tidak berjalan efektif karena keterbatasan insentif dan fasilitas.

Pengawasan mutu pendidikan di daerah juga menghadapi tantangan. Dinas pendidikan sering kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Akibatnya, mutu pendidikan di daerah sangat bervariasi dan belum merata.

Kebijakan pendidikan daerah juga dipengaruhi oleh faktor politik lokal. Kepala daerah sering menjadikan program pendidikan sebagai janji politik. Program beasiswa atau pembangunan sekolah baru kadang lebih berorientasi pada popularitas daripada kebutuhan nyata.

Meski demikian, otonomi pendidikan tetap memiliki nilai positif. Dengan kewenangan lebih besar, daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi spesifik. Misalnya, daerah kepulauan dapat membuat kebijakan transportasi khusus untuk siswa yang harus menyeberang pulau.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan. Pusat memberikan standar nasional dan anggaran, sementara daerah menyesuaikan pelaksanaan sesuai konteks lokal. Sinergi ini penting agar kebijakan pendidikan tetap sejalan dengan tujuan nasional sekaligus relevan dengan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan daerah dalam kerangka otonomi pendidikan merupakan upaya mewujudkan pemerataan dan relevansi pendidikan. Tantangan yang ada harus diatasi dengan penguatan kapasitas daerah, peningkatan koordinasi, dan dukungan dari pemerintah pusat.

D. Kebijakan Kurikulum: Dari Kurikulum 1947 hingga Merdeka Belajar

Perjalanan kebijakan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika pendidikan dan perkembangan sosial politik bangsa. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, yang masing-masing mencerminkan orientasi kebijakan pada masanya.

Kurikulum pertama pasca-kemerdekaan adalah Kurikulum 1947, yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947. Kurikulum ini menekankan pendidikan karakter dan watak bangsa, sejalan dengan semangat perjuangan kemerdekaan.

Kurikulum 1968 menggantikan kurikulum sebelumnya dengan penekanan pada pembentukan manusia Pancasila. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembangunan nasional dan loyalitas terhadap negara.

Kurikulum 1975 memperkenalkan pendekatan tujuan instruksional yang lebih sistematis. Guru diharapkan menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan yang terukur. Namun, kurikulum ini dikritik terlalu birokratis dan membebani guru.

Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Meski inovatif, kurikulum ini sulit diterapkan karena keterbatasan fasilitas dan pemahaman guru.

Kurikulum 1994 kemudian lahir dengan penekanan pada padatnya muatan pelajaran. Kritik terhadap kurikulum ini adalah beban siswa yang terlalu berat.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan pada 2004, dengan fokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK dianggap lebih relevan dengan kebutuhan global, tetapi penerapannya terbatas.

Kurikulum 2013 atau K-13 menjadi reformasi besar berikutnya. Kurikulum ini menekankan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun implementasinya menghadapi tantangan besar, terutama pada kesiapan guru dan ketersediaan buku.

Kebijakan terbaru adalah Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada 2020. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan fokus pada kompetensi esensial. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa.

Perjalanan kurikulum ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat dinamis.

Setiap perubahan kurikulum mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan zaman, mulai dari semangat nasionalisme, kebutuhan pembangunan, hingga tuntutan globalisasi.

Meskipun sering berubah, kebijakan kurikulum di Indonesia tetap mengandung semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tantangan terbesar adalah konsistensi implementasi dan kesiapan pelaksana di lapangan.

Dengan memahami sejarah perubahan kurikulum, mahasiswa pascasarjana dapat melihat bagaimana kebijakan publik di bidang pendidikan tidak pernah lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi bangsa.

E. Dampak Jenis Kebijakan Publik terhadap Mutu Pendidikan

Jenis-jenis kebijakan publik dalam pendidikan memiliki dampak langsung terhadap mutu pendidikan. Kebijakan distributif memperluas akses, kebijakan redistributif mewujudkan keadilan, sedangkan kebijakan regulatif menjaga standar mutu. Kombinasi ketiganya menentukan sejauh mana mutu pendidikan nasional dapat ditingkatkan.

Kebijakan distributif, seperti BOS, terbukti mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah. Banyak siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan berkat adanya dana bantuan. Dengan demikian, kebijakan distributif berdampak positif pada pemerataan akses pendidikan.

Kebijakan redistributif, seperti afirmasi untuk daerah tertinggal atau siswa dari kelompok minoritas,

berkontribusi pada keadilan sosial. Dengan adanya kebijakan ini, kelompok yang selama ini terpinggirkan dapat memperoleh kesempatan yang sama. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya kohesi sosial dan keadilan dalam sistem pendidikan.

Kebijakan regulatif menjaga agar mutu pendidikan tetap sesuai standar. Misalnya, kebijakan akreditasi sekolah memastikan bahwa sekolah memenuhi standar minimal sarana, guru, dan proses pembelajaran. Dampak dari regulasi ini adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.

Namun, dampak kebijakan juga dapat bersifat ambivalen. Kebijakan redistributif seperti sistem zonasi sekolah, meski bertujuan pemerataan, sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif.

Kebijakan pendidikan nasional, seperti UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk peningkatan mutu. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dapat mengembangkan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Kebijakan pendidikan daerah juga berkontribusi pada mutu pendidikan. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti digitalisasi sekolah atau program beasiswa lokal, dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Namun, kesenjangan kapasitas antar daerah sering kali menyebabkan perbedaan mutu pendidikan yang signifikan.

Kebijakan kurikulum memiliki dampak paling langsung terhadap mutu pembelajaran. Kurikulum Merdeka, misalnya, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan fleksibilitas kepada guru dan menekankan pembelajaran berbasis kompetensi. Namun, keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada kesiapan guru dan sarana pendukung.

Jenis kebijakan juga memengaruhi motivasi guru dan siswa. Kebijakan sertifikasi guru, misalnya, meningkatkan profesionalisme guru sekaligus memberikan insentif finansial. Sementara kebijakan beasiswa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat.

Dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh implementasi. Kebijakan yang baik di atas kertas tidak akan berdampak jika implementasinya lemah. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan kebijakan benar-benar meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu, dampak kebijakan publik terhadap mutu pendidikan harus dilihat dalam jangka panjang. Misalnya, kebijakan wajib belajar baru akan terlihat hasilnya setelah beberapa dekade ketika generasi yang dididik memasuki dunia kerja.

Dengan demikian, jenis-jenis kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda namun saling melengkapi terhadap mutu pendidikan. Kombinasi kebijakan distributif, redistributif, dan regulatif yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan akses, keadilan, dan mutu pendidikan secara bersamaan.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 5

A. Tujuan dan Manfaat Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan aktivitas penting yang bertujuan memahami, menilai, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang sedang atau akan diterapkan. Dalam konteks pendidikan, analisis kebijakan membantu pemerintah, praktisi, dan masyarakat memahami apakah suatu kebijakan efektif, efisien, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa analisis, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran atau bahkan menimbulkan dampak negatif.

Tujuan utama analisis kebijakan adalah memberikan landasan rasional bagi pengambilan keputusan. Dengan analisis, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada intuisi atau tekanan politik, tetapi juga pada data, bukti empiris, dan kajian akademis. Hal ini penting agar kebijakan publik memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab persoalan pendidikan secara komprehensif.

Manfaat analisis kebijakan terlihat dari kemampuannya dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan suatu kebijakan. Misalnya, analisis kebijakan kurikulum dapat menunjukkan sejauh mana kurikulum baru efektif meningkatkan kompetensi siswa, serta aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki. Dengan cara

ini, kebijakan dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

Analisis kebijakan juga berfungsi sebagai alat evaluasi akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat menilai apakah dana yang digunakan dalam program pendidikan, seperti BOS, benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, analisis kebijakan memiliki tujuan normatif, yakni memastikan kebijakan sejalan dengan nilai dan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, analisis kebijakan harus memastikan kebijakan pendidikan selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan visi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Manfaat analisis kebijakan juga dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan adanya analisis yang baik, kebijakan pendidikan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan generasi mendatang agar memiliki daya saing global. Analisis kebijakan dengan perspektif futuristik ini sangat relevan di era revolusi industri 4.0.

Bagi praktisi pendidikan, analisis kebijakan bermanfaat untuk memahami implikasi kebijakan terhadap pekerjaan mereka. Guru, kepala sekolah, dan dosen dapat mengetahui bagaimana kebijakan memengaruhi proses pembelajaran, penilaian, atau manajemen sekolah. Pemahaman ini penting agar mereka dapat beradaptasi dengan kebijakan baru.

Analisis kebijakan juga memberikan manfaat bagi akademisi. Kajian akademis tentang kebijakan publik dapat memperkaya literatur ilmiah, memberikan kontribusi teoretis, sekaligus memberi rekomendasi

praktis bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, akademisi berperan penting dalam menghubungkan teori dan praktik kebijakan.

Dalam konteks global, analisis kebijakan bermanfaat untuk membandingkan kebijakan antarnegara. Misalnya, Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan tertentu. Analisis komparatif ini membantu Indonesia merumuskan kebijakan yang lebih inovatif.

Tujuan lain dari analisis kebijakan adalah memberikan alternatif solusi. Jika suatu kebijakan terbukti kurang efektif, analisis dapat menawarkan pilihan kebijakan lain yang lebih sesuai. Dengan demikian, analisis kebijakan membantu memperluas ruang diskusi dan inovasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Dengan semua tujuan dan manfaat tersebut, analisis kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses intelektual sekaligus praktis. Dalam pendidikan, analisis kebijakan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peserta didik, guru, dan masyarakat.

B. Pendekatan Analisis: Rasional, Politik, Advokasi, dan Evaluatif

Analisis kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, tergantung pada fokus dan tujuan analisis. Salah satu pendekatan yang paling umum adalah pendekatan rasional. Pendekatan ini menekankan penggunaan data, fakta, dan logika untuk

menilai kebijakan. Analisis rasional biasanya menggunakan metode kuantitatif seperti survei, statistik, dan model ekonomi untuk mengukur efektivitas kebijakan.

Pendekatan rasional memiliki kelebihan dalam memberikan hasil yang objektif dan terukur. Misalnya, analisis rasional dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan BOS benar-benar meningkatkan angka partisipasi sekolah. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena cenderung mengabaikan faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai pelengkap, pendekatan politik memandang kebijakan sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Analisis politik tidak hanya menilai isi kebijakan, tetapi juga melihat dinamika kekuasaan, negosiasi, dan kompromi di balik pembuatan kebijakan. Dalam pendidikan, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami mengapa kebijakan ujian nasional pernah mendapat dukungan sebagian elite politik meskipun dikritik oleh masyarakat luas.

Pendekatan politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan tertentu bertahan meski terbukti kurang efektif. Hal ini sering kali karena kebijakan tersebut didukung oleh kelompok kepentingan yang kuat. Dengan demikian, analisis politik penting untuk memahami dimensi kekuasaan dalam kebijakan publik.

Pendekatan advokasi muncul dari kebutuhan untuk memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili dalam proses kebijakan. Analisis advokasi berusaha memengaruhi pembuat kebijakan agar lebih

memperhatikan kebutuhan kelompok marginal, seperti siswa miskin, anak berkebutuhan khusus, atau daerah tertinggal.

Dalam praktiknya, pendekatan advokasi sering digunakan oleh LSM, organisasi profesi guru, atau komunitas pendidikan. Mereka menyusun laporan, melakukan kampanye, atau melobi pembuat kebijakan agar kebijakan lebih berpihak pada kelompok yang rentan. Analisis advokasi penting dalam menjaga keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan.

Pendekatan evaluatif menekankan penilaian terhadap hasil kebijakan. Fokusnya adalah apakah kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menggunakan berbagai indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan.

Analisis evaluatif biasanya dilakukan setelah kebijakan berjalan selama beberapa waktu. Misalnya, setelah lima tahun implementasi kurikulum baru, evaluasi dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap kompetensi siswa. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memutuskan apakah kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Keempat pendekatan ini tidak saling meniadakan, melainkan dapat saling melengkapi. Analisis rasional memberikan data objektif, analisis politik menjelaskan dinamika kekuasaan, analisis advokasi memastikan keadilan sosial, dan analisis evaluatif menilai capaian kebijakan. Kombinasi keempatnya akan menghasilkan analisis kebijakan yang lebih komprehensif.

Bagi mahasiswa pascasarjana, memahami berbagai pendekatan analisis kebijakan sangat penting.

Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan fokus penelitian atau kajian yang sedang dilakukan.

Dengan memahami dan menguasai keempat pendekatan tersebut, analis kebijakan pendidikan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kebijakan publik. Analisis yang komprehensif akan lebih bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

C. Teknik Analisis: *Cost-Benefit Analysis,* SWOT, *Stakeholder Analysis*

Dalam analisis kebijakan publik, berbagai teknik dapat digunakan untuk menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Salah satu teknik yang paling dikenal adalah *cost-benefit analysis*. Teknik ini menilai suatu kebijakan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, kebijakan dianggap layak untuk dijalankan.

Cost-benefit analysis banyak digunakan dalam kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Misalnya, pemerintah dapat menghitung apakah investasi dalam pembangunan sekolah baru di daerah terpencil lebih efektif dibandingkan dengan memberikan beasiswa transportasi kepada siswa. Dengan perhitungan yang tepat, pemerintah dapat memilih opsi yang paling efisien.

Namun, *cost-benefit analysis* memiliki keterbatasan karena tidak semua manfaat kebijakan dapat diukur secara kuantitatif. Manfaat pendidikan

dalam membentuk karakter, meningkatkan solidaritas sosial, atau memperkuat demokrasi sulit untuk diukur dengan angka. Oleh karena itu, analisis ini harus dipadukan dengan pendekatan lain.

Teknik analisis lain yang populer adalah SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT membantu melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu kebijakan. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar dapat dianalisis melalui kekuatannya dalam memberikan fleksibilitas, kelemahannya dalam kesiapan guru, peluangnya dalam meningkatkan kreativitas siswa, dan ancamannya dalam kesenjangan digital.

SWOT sangat berguna dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan. Dengan mengetahui kelemahan dan ancaman, pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipatif. Sementara kekuatan dan peluang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan kebijakan.

Stakeholder analysis juga merupakan teknik penting dalam analisis kebijakan publik. Teknik ini bertujuan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan, serta menganalisis kepentingan, pengaruh, dan peran mereka. Dalam kebijakan pendidikan, *stakeholder* dapat mencakup pemerintah pusat, daerah, guru, siswa, orang tua, organisasi profesi, dan dunia usaha.

Stakeholder analysis membantu memahami siapa yang mendukung atau menolak kebijakan, serta bagaimana membangun koalisi untuk mendukung implementasi. Misalnya, kebijakan sertifikasi guru mendapat dukungan organisasi profesi guru, tetapi

menghadapi tantangan dari pihak yang menilai kebijakan ini membebani anggaran.

Teknik ini juga bermanfaat untuk merancang komunikasi kebijakan. Dengan mengetahui kepentingan setiap *stakeholder*, pemerintah dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat agar kebijakan lebih mudah diterima.

Selain tiga teknik utama tersebut, terdapat teknik lain seperti analisis risiko, analisis dampak regulasi, atau analisis multikriteria. Semua teknik ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan jenis kebijakan yang dianalisis.

Penggunaan teknik analisis yang tepat akan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan. Tanpa analisis yang sistematis, kebijakan berisiko hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau intuisi semata.

Dengan demikian, *cost-benefit analysis*, SWOT, dan *stakeholder analysis* merupakan tiga teknik utama yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan. Kombinasi ketiganya akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kelayakan, peluang, tantangan, serta dukungan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

D. Peran Analis Kebijakan Pendidikan

Analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan berbasis bukti, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mereka bertugas mengumpulkan data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi

kepada pembuat kebijakan. Dalam sistem demokrasi, peran analis sangat penting untuk menjaga agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga pada pertimbangan akademis dan profesional.

Peran utama analis kebijakan adalah menyediakan informasi yang valid dan terpercaya. Mereka melakukan penelitian, survei, dan evaluasi untuk memahami masalah pendidikan secara objektif. Informasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang realistis.

Analis kebijakan juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Mereka menerjemahkan data teknis menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan maupun publik. Dengan demikian, analis berkontribusi dalam meningkatkan transparansi kebijakan.

Selain itu, analis kebijakan berfungsi sebagai penilai independen. Mereka menilai efektivitas kebijakan yang sedang berjalan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Misalnya, analis dapat menilai apakah kebijakan zonasi sekolah benar-benar meningkatkan pemerataan pendidikan atau justru menimbulkan masalah baru.

Analis kebijakan juga berperan dalam melakukan perbandingan kebijakan antarnegara. Dengan membandingkan praktik terbaik dari negara lain, analis dapat memberikan rekomendasi inovatif yang sesuai dengan konteks Indonesia. Perbandingan ini penting untuk meningkatkan daya saing sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks pendidikan, analis kebijakan sering berasal dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, atau birokrat profesional. Mereka bekerja secara kolaboratif dengan guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan untuk memperoleh data dan masukan dari lapangan.

Analis kebijakan juga harus mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendukung kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas yang dapat menunjukkan kelemahan dan risiko kebijakan. Peran kritis ini penting untuk menjaga kualitas kebijakan publik.

Selain itu, analis kebijakan perlu memahami dinamika politik. Mereka harus mampu membaca kepentingan aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses kebijakan. Pemahaman ini penting agar rekomendasi yang mereka berikan realistis dan dapat diterima dalam konteks politik yang ada.

Peran analis juga mencakup penyusunan laporan kebijakan. Laporan ini biasanya berisi analisis masalah, alternatif solusi, serta rekomendasi kebijakan. Laporan yang baik dapat menjadi dasar kuat bagi pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan.

Analis kebijakan pendidikan juga berkontribusi dalam pengembangan kapasitas. Mereka dapat memberikan pelatihan atau *workshop* kepada guru, kepala sekolah, atau birokrat pendidikan tentang cara melakukan analisis sederhana. Dengan demikian, kapasitas analisis kebijakan dapat tersebar lebih luas.

Dengan semua peran tersebut, analis kebijakan pendidikan menjadi aktor penting dalam siklus kebijakan. Mereka berkontribusi tidak hanya pada tahap

perumusan, tetapi juga pada implementasi dan evaluasi kebijakan. Peran ini menjadikan analis sebagai penghubung antara teori akademis dan praktik kebijakan.

Dengan demikian, keberadaan analis kebijakan pendidikan sangat vital dalam mewujudkan kebijakan yang berbasis bukti, transparan, dan akuntabel. Tanpa analis yang kompeten, kebijakan berisiko tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

E. Studi Kasus: Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu kebijakan distributif paling penting dalam pendidikan di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2005, program ini bertujuan membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional nonpersonalia, sehingga beban biaya pendidikan masyarakat dapat berkurang. Analisis terhadap kebijakan ini penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

Salah satu tujuan utama program BOS adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat membebaskan atau mengurangi pungutan kepada orang tua, sehingga lebih banyak anak dapat bersekolah. Analisis menunjukkan bahwa setelah program BOS diluncurkan, angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar dan menengah mengalami peningkatan signifikan.

Namun, efektivitas program BOS juga bergantung pada mekanisme distribusi dan penggunaan dana.

Analisis menemukan bahwa di beberapa daerah, penggunaan dana BOS masih menghadapi kendala akuntabilitas. Ada kasus di mana dana tidak digunakan sesuai pedoman, sehingga manfaatnya tidak optimal.

Dari perspektif efisiensi, program BOS dinilai cukup berhasil karena langsung menyalurkan dana ke rekening sekolah. Mekanisme ini mengurangi birokrasi dan mempercepat penggunaan dana. Namun, tantangan muncul dalam kapasitas manajemen sekolah yang belum merata. Beberapa sekolah kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar.

Analisis politik terhadap program BOS menunjukkan bahwa program ini mendapat dukungan kuat dari masyarakat karena manfaatnya dirasakan langsung. Dukungan politik ini membuat program BOS terus berlanjut hingga sekarang, bahkan dengan peningkatan besaran dana dari tahun ke tahun.

Dari sisi keadilan, program BOS memberikan manfaat lebih besar bagi sekolah negeri dan siswa dari keluarga miskin. Namun, ada kritik bahwa sekolah swasta kecil kurang mendapat dukungan memadai, padahal mereka juga melayani siswa dari kalangan ekonomi lemah. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan redistributif tambahan untuk sekolah swasta.

Stakeholder analysis menunjukkan bahwa program BOS melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat. Hubungan antar *stakeholder* ini menentukan keberhasilan implementasi. Jika koordinasi lemah, dana BOS berisiko tidak tepat sasaran.

Analisis SWOT terhadap program BOS menunjukkan bahwa kekuatan utama program ini adalah dukungan politik dan manfaat langsung bagi masyarakat. Kelemahannya adalah keterbatasan kapasitas manajemen sekolah. Peluangnya adalah peningkatan transparansi melalui digitalisasi laporan, sementara ancamannya adalah potensi penyalahgunaan dana.

Program BOS juga berdampak pada mutu pendidikan. Dengan adanya dana tambahan, sekolah dapat membeli buku, memperbaiki sarana, dan mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada dana, tetapi juga pada kualitas guru dan manajemen sekolah.

Evaluasi program BOS menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memperluas akses, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas dan pemerataan. Oleh karena itu, analisis merekomendasikan peningkatan pelatihan manajemen keuangan bagi sekolah, penguatan pengawasan, serta dukungan khusus bagi sekolah swasta kecil.

Program BOS menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan distributif dapat memberikan dampak positif besar, tetapi tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Analisis terhadap program ini menunjukkan pentingnya pendekatan rasional, politik, advokasi, dan evaluatif secara bersamaan.

Dengan demikian, studi kasus BOS menegaskan pentingnya analisis kebijakan publik dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mencapai tujuannya. Tanpa analisis yang mendalam, kebijakan berisiko hanya menjadi program rutin tanpa

memberikan perubahan signifikan bagi mutu pendidikan.

METODE EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

BAB 6

A. Pengertian Evaluasi Program Pendidikan

Evaluasi program pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Evaluasi bukan sekadar memberikan penilaian akhir, melainkan juga berfungsi sebagai alat refleksi dan pengambilan keputusan untuk perbaikan program. Dalam konteks akademis, evaluasi program pendidikan dipandang sebagai bagian integral dari manajemen pendidikan yang memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan.

Secara etimologis, istilah evaluasi berasal dari kata "*evaluation*" yang berarti proses penilaian terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pendidikan, evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari input (sumber daya), proses (implementasi), hingga *output* dan *outcome* (hasil belajar dan dampaknya terhadap masyarakat). Dengan cakupan yang luas ini, evaluasi menjadi instrumen penting dalam memastikan mutu pendidikan.

Berbeda dengan sekadar penilaian, evaluasi bersifat komprehensif dan analitis. Penilaian biasanya hanya berfokus pada capaian siswa, sedangkan evaluasi

mencakup seluruh komponen sistem pendidikan, termasuk kebijakan, kurikulum, tenaga pendidik, dan manajemen sekolah. Oleh karena itu, evaluasi program pendidikan dipandang sebagai proses strategis yang menentukan arah kebijakan di masa depan.

Evaluasi program pendidikan dapat dilakukan pada berbagai level, mulai dari sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Setiap level memiliki fokus evaluasi yang berbeda. Di sekolah, evaluasi mungkin berfokus pada efektivitas pembelajaran, sedangkan di tingkat nasional, evaluasi dapat menyasar capaian target pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam literatur manajemen pendidikan, evaluasi sering dikaitkan dengan proses pengendalian mutu. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana standar nasional pendidikan telah dipenuhi. Misalnya, delapan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia menjadi tolok ukur dalam akreditasi sekolah yang berbasis evaluasi.

Pengertian evaluasi juga mencakup dimensi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama program berlangsung untuk memberikan umpan balik dan perbaikan segera. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk menilai keberhasilan secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi menilai hasil akhir, tetapi juga memperbaiki proses.

Pengertian evaluasi program pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya. Evaluasi bukan hanya proses teknis, tetapi juga proses sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat memiliki perspektif berbeda yang perlu diakomodasi dalam evaluasi.

Dalam konteks internasional, evaluasi program pendidikan sering digunakan untuk membandingkan capaian antarnegara. Misalnya, hasil tes PISA yang dilakukan oleh OECD digunakan sebagai indikator global mutu pendidikan. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Evaluasi program pendidikan juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas. Sekolah dan pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendidikan melalui laporan hasil evaluasi. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Definisi evaluasi program pendidikan menekankan pada proses ilmiah dan sistematis. Evaluasi harus dilakukan dengan metode yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pendekatan ilmiah, hasil evaluasi berpotensi bias dan tidak dapat digunakan sebagai dasar kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi program pendidikan dapat dipahami sebagai proses sistematis, komprehensif, dan ilmiah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program pendidikan. Pengertian ini menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya bagian tambahan, melainkan elemen utama dalam manajemen pendidikan modern.

B. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Tujuan utama evaluasi program pendidikan adalah mengetahui sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi membantu menjawab pertanyaan penting: apakah program berjalan sesuai rencana, apakah sumber daya digunakan secara efektif, dan apakah hasil yang dicapai sesuai harapan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, evaluasi memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Selain tujuan utama, evaluasi memiliki tujuan diagnostik, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan suatu program. Dengan mengetahui kelemahan, pengelola dapat melakukan perbaikan, sementara kekuatan dapat diperkuat agar program lebih efektif. Dalam pendidikan, tujuan diagnostik ini sangat penting karena memungkinkan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan lain dari evaluasi adalah memberikan informasi untuk perencanaan masa depan. Hasil evaluasi program saat ini dapat menjadi pelajaran berharga dalam merancang program baru. Misalnya, evaluasi kebijakan kurikulum sebelumnya dapat digunakan untuk menyusun kurikulum yang lebih relevan di masa mendatang.

Evaluasi juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dan pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa dana pendidikan digunakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan dukungan berkelanjutan bagi program pendidikan.

Dari sisi manfaat, evaluasi memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak, program dapat disesuaikan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Evaluasi menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta antara kebijakan dan implementasi.

Manfaat lain dari evaluasi adalah sebagai alat komunikasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang keberhasilan program pendidikan. Dengan demikian, evaluasi memperkuat transparansi dan keterbukaan sistem pendidikan.

Evaluasi juga bermanfaat sebagai alat motivasi. Guru, siswa, dan sekolah yang mendapat hasil baik dari evaluasi akan merasa termotivasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya, hasil evaluasi yang kurang baik dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki diri.

Bagi pembuat kebijakan, evaluasi bermanfaat untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan mengetahui penyebab kegagalan suatu program, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan efektif. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran kebijakan.

Evaluasi juga memberikan manfaat akademis. Data yang dihasilkan dari evaluasi dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan publikasi ilmiah. Hal ini memperkaya pengetahuan tentang manajemen pendidikan dan kebijakan publik.

Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Masyarakat dapat menggunakan hasil evaluasi untuk mengawasi pemerintah dan memastikan

bahwa pendidikan benar-benar dijalankan untuk kepentingan publik.

Dengan berbagai tujuan dan manfaat tersebut, evaluasi program pendidikan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan tambahan. Evaluasi adalah bagian integral dari siklus program yang menentukan keberhasilan jangka panjang pendidikan.

C. Prinsip-prinsip Evaluasi (Objektivitas, Transparansi, Akuntabilitas)

Agar evaluasi program pendidikan dapat dipercaya dan bermanfaat, pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip pertama adalah objektivitas. Evaluasi harus didasarkan pada data yang valid dan reliabel, bukan pada opini atau kepentingan tertentu. Objektivitas menjamin bahwa hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi program yang dievaluasi.

Objektivitas dalam evaluasi dapat dijaga melalui penggunaan instrumen yang sahih, prosedur yang jelas, dan analisis yang sistematis. Evaluator harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik atau pribadi agar hasil evaluasi tidak bias. Hal ini sangat penting dalam pendidikan, di mana hasil evaluasi sering kali menjadi dasar pengambilan kebijakan besar.

Prinsip kedua adalah transparansi. Proses evaluasi harus dilakukan secara terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Transparansi mencakup keterbukaan informasi kepada semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan transparansi, hasil evaluasi lebih mudah diterima dan dipercaya oleh publik.

Transparansi juga berarti bahwa kriteria dan indikator evaluasi harus jelas sejak awal. Misalnya, jika evaluasi bertujuan menilai mutu sekolah, indikator apa saja yang digunakan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Hal ini mencegah munculnya kecurigaan atau kesalahpahaman di kalangan pihak yang dievaluasi.

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas. Evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun moral. Secara ilmiah, metode yang digunakan harus sesuai dengan standar penelitian. Secara moral, evaluasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak yang dievaluasi dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Akuntabilitas dalam evaluasi juga berkaitan dengan penggunaan hasil. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki program, bukan sekadar menjadi laporan formal. Dengan demikian, evaluasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.

Prinsip-prinsip lain yang mendukung adalah relevansi dan keberlanjutan. Evaluasi harus relevan dengan tujuan program dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar perbaikan dapat terus dilakukan. Evaluasi sekali waktu tidak cukup untuk menjamin mutu pendidikan dalam jangka panjang.

Objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas juga saling terkait. Tanpa objektivitas, transparansi menjadi tidak berarti karena informasi yang disampaikan tidak akurat. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit dicapai karena publik tidak mengetahui proses evaluasi. Dengan

demikian, ketiga prinsip ini harus diterapkan secara bersamaan.

Dalam praktiknya, menjaga prinsip evaluasi sering kali menjadi tantangan. Misalnya, tekanan politik dapat mengganggu objektivitas, keterbatasan akses informasi mengurangi transparansi, dan penggunaan hasil yang tidak optimal melemahkan akuntabilitas. Oleh karena itu, evaluator harus memiliki integritas dan komitmen tinggi.

Prinsip-prinsip evaluasi juga didukung oleh regulasi. Di Indonesia, misalnya, akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional yang menerapkan standar objektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini memperkuat implementasi prinsip evaluasi dalam praktik nyata.

Dengan demikian, penerapan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak agar evaluasi program pendidikan memiliki kredibilitas. Tanpa prinsip-prinsip ini, evaluasi berisiko menjadi formalitas semata tanpa memberikan manfaat nyata bagi perbaikan pendidikan.

D. Jenis Evaluasi: Formatif, Sumatif, Responsif, dan Lainnya

Evaluasi program pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, tergantung pada tujuan, waktu pelaksanaan, dan pendekatan yang digunakan. Salah satu pembagian yang paling umum adalah evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama program berjalan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan segera, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan

setelah program selesai untuk menilai keberhasilan secara keseluruhan.

Evaluasi formatif memiliki keunggulan dalam memberikan informasi cepat bagi perbaikan. Misalnya, dalam implementasi kurikulum baru, evaluasi formatif dapat mengidentifikasi masalah di awal sehingga perbaikan dapat segera dilakukan sebelum masalah menjadi lebih besar. Dengan demikian, evaluasi formatif bersifat preventif.

Sebaliknya, evaluasi sumatif lebih menekankan pada hasil akhir. Evaluasi ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan apakah program akan dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi. Misalnya, evaluasi sumatif terhadap program BOS digunakan untuk menilai apakah program tersebut efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah.

Selain formatif dan sumatif, terdapat jenis evaluasi responsif yang menekankan pada kebutuhan dan perspektif pemangku kepentingan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada indikator yang telah ditentukan, tetapi juga memperhatikan isu yang muncul dari masyarakat. Dalam pendidikan, evaluasi responsif berguna untuk memahami pengalaman guru, siswa, dan orang tua terhadap kebijakan tertentu.

Jenis evaluasi lain adalah evaluasi proses, yang menilai bagaimana program dilaksanakan. Evaluasi ini fokus pada kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Misalnya, apakah dana BOS digunakan sesuai pedoman atau tidak. Evaluasi ini penting untuk menilai akuntabilitas dan efisiensi program.

Evaluasi hasil (*outcome evaluation*) menilai dampak program terhadap peserta didik atau

masyarakat. Misalnya, apakah program pelatihan guru benar-benar meningkatkan kompetensi guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Evaluasi ini menekankan pada capaian nyata dari program.

Evaluasi dampak (*impact evaluation*) lebih luas lagi karena menilai konsekuensi jangka panjang suatu program. Misalnya, apakah kebijakan wajib belajar berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau penurunan angka kemiskinan. Evaluasi ini sangat penting dalam mengukur kontribusi pendidikan terhadap pembangunan nasional.

Jenis evaluasi juga dapat dibedakan berdasarkan fokusnya. Evaluasi kebutuhan (*needs assessment*) menilai apakah suatu program diperlukan. Evaluasi efisiensi menilai apakah sumber daya digunakan dengan optimal. Evaluasi efektivitas menilai apakah tujuan tercapai, sedangkan evaluasi keberlanjutan menilai apakah program dapat terus berjalan dalam jangka panjang.

Dengan berbagai jenis evaluasi ini, jelas bahwa tidak ada satu jenis evaluasi yang cukup untuk menilai seluruh aspek program pendidikan. Kombinasi beberapa jenis evaluasi diperlukan agar gambaran yang diperoleh lebih komprehensif.

Dalam praktiknya, jenis evaluasi yang dipilih tergantung pada tujuan analisis dan ketersediaan sumber daya. Evaluasi formatif cocok untuk program baru, evaluasi sumatif untuk program yang sudah selesai, dan evaluasi responsif untuk memahami perspektif masyarakat.

Dengan memahami berbagai jenis evaluasi, pengelola pendidikan dapat memilih strategi yang tepat

untuk menilai program. Hal ini penting agar evaluasi benar-benar berfungsi sebagai alat perbaikan dan pengambilan keputusan yang efektif.

E. Pendekatan Evaluasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan *Mixed Methods*

Pendekatan evaluasi program pendidikan dapat dibedakan menjadi kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods.* Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengukuran dengan angka dan analisis statistik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai berdasarkan indikator yang terukur, seperti angka partisipasi sekolah, nilai ujian, atau jumlah lulusan.

Kelebihan pendekatan kuantitatif adalah hasilnya objektif, mudah dibandingkan, dan dapat digeneralisasi. Misalnya, evaluasi program BOS dengan pendekatan kuantitatif dapat menunjukkan secara jelas peningkatan partisipasi sekolah dalam bentuk persentase. Namun, pendekatan ini kurang mampu menangkap pengalaman subjektif guru atau siswa.

Sebaliknya, pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan konteks sosial. Pendekatan ini menggunakan metode wawancara, observasi, atau studi kasus. Dalam evaluasi pendidikan, pendekatan kualitatif berguna untuk memahami bagaimana guru mengimplementasikan kurikulum baru atau bagaimana siswa merasakan perubahan kebijakan.

Kelebihan pendekatan kualitatif adalah kemampuannya menggali informasi yang tidak dapat diukur dengan angka. Misalnya, perasaan siswa tentang

kenyamanan belajar daring hanya dapat dipahami melalui wawancara mendalam. Namun, kelemahan pendekatan ini adalah keterbatasan dalam generalisasi.

Pendekatan *mixed methods* menggabungkan kelebihan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan ini, evaluasi menggunakan data statistik untuk memberikan gambaran umum sekaligus data kualitatif untuk memahami konteks. Misalnya, evaluasi program digitalisasi sekolah dapat menggunakan survei kuantitatif untuk menilai peningkatan akses teknologi dan wawancara kualitatif untuk memahami kendala guru.

Mixed methods dianggap sebagai pendekatan yang paling komprehensif karena mampu memberikan gambaran luas sekaligus pemahaman mendalam. Namun, pendekatan ini membutuhkan lebih banyak sumber daya, waktu, dan keterampilan.

Dalam praktiknya, pemilihan pendekatan evaluasi bergantung pada tujuan dan jenis program. Jika tujuannya menilai capaian kuantitatif, pendekatan kuantitatif lebih tepat. Jika ingin memahami proses dan pengalaman, pendekatan kualitatif lebih relevan. Jika ingin keduanya, *mixed methods* adalah pilihan terbaik.

Di Indonesia, banyak evaluasi pendidikan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, seperti survei nasional atau ujian standar. Namun, pendekatan kualitatif dan *mixed methods* semakin banyak digunakan untuk memahami konteks lokal dan pengalaman masyarakat.

Pendekatan evaluasi juga dipengaruhi oleh paradigma penelitian yang dianut. Pendekatan kuantitatif sesuai dengan paradigma positivistik,

kualitatif dengan paradigma konstruktivistik, sedangkan *mixed methods* berusaha menjembatani keduanya. Pemahaman paradigma ini penting bagi mahasiswa pascasarjana agar mampu memilih pendekatan sesuai dengan latar belakang akademis dan tujuan penelitian.

Pendekatan evaluasi yang tepat akan menghasilkan informasi yang lebih valid dan bermanfaat. Misalnya, hasil evaluasi kuantitatif dapat digunakan untuk kebijakan nasional, sementara hasil evaluasi kualitatif dapat digunakan untuk kebijakan lokal yang lebih kontekstual.

Dengan demikian, kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods* bukanlah pendekatan yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Penggunaan kombinasi ketiganya akan memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan mampu mendukung kebijakan pendidikan yang lebih baik.

DESAIN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

BAB 7

A. Pentingnya Desain dalam Evaluasi Program

Desain evaluasi program merupakan kerangka konseptual dan metodologis yang menentukan bagaimana suatu evaluasi dilakukan. Tanpa desain yang jelas, evaluasi berisiko tidak terarah, tidak valid, dan tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, desain evaluasi dipandang sebagai fondasi yang menentukan keberhasilan proses evaluasi program pendidikan.

Pentingnya desain evaluasi terlihat dari perannya dalam memastikan sistematika penelitian. Desain yang baik akan mengarahkan evaluator dalam mengidentifikasi tujuan, menentukan instrumen, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Dengan demikian, setiap langkah evaluasi tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti pola yang konsisten.

Desain juga berfungsi untuk menjaga validitas evaluasi. Tanpa desain yang tepat, hasil evaluasi bisa bias atau salah tafsir. Misalnya, jika evaluator tidak memperhitungkan variabel luar yang memengaruhi hasil, maka kesimpulan evaluasi bisa keliru. Dengan desain yang matang, risiko kesalahan dapat diminimalisasi.

Selain itu, desain evaluasi menentukan tingkat keandalan hasil. Evaluasi yang dilakukan dengan desain yang jelas lebih mudah di replikasi oleh peneliti atau evaluator lain. Replikasi ini penting untuk menguji konsistensi hasil dan memperkuat kredibilitas evaluasi.

Dalam konteks pendidikan, pentingnya desain evaluasi juga terkait dengan kompleksitas program yang dievaluasi. Program pendidikan sering kali melibatkan banyak aktor, tujuan yang beragam, serta indikator yang luas. Tanpa desain yang sistematis, sulit untuk menangkap kompleksitas ini secara menyeluruh.

Desain evaluasi juga membantu dalam pemilihan metode yang sesuai. Misalnya, apakah evaluasi lebih tepat dilakukan dengan eksperimen, survei, wawancara mendalam, atau kombinasi dari semuanya. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan desain evaluasi agar hasil lebih relevan.

Selain aspek metodologis, desain evaluasi juga memiliki nilai praktis. Desain yang baik akan memudahkan pengelolaan sumber daya, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Evaluasi dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas hasil.

Dalam dunia akademis, desain evaluasi juga memberikan kontribusi teoritis. Hasil evaluasi dengan desain yang baik dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut, memperkuat teori yang ada, atau bahkan menghasilkan teori baru tentang pendidikan.

Desain evaluasi juga penting dalam komunikasi hasil. Evaluasi yang terstruktur memudahkan penyusunan laporan yang sistematis, sehingga hasil lebih mudah dipahami oleh pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, maupun masyarakat umum.

Selain itu, desain evaluasi memastikan bahwa proses evaluasi sejalan dengan tujuan awal. Banyak evaluasi gagal karena tujuan dan hasil tidak selaras. Dengan desain yang jelas, setiap langkah evaluasi dapat diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan.

Dalam praktik, pentingnya desain evaluasi sering kali baru disadari ketika evaluasi gagal memberikan informasi yang berguna. Oleh karena itu, penyusunan desain evaluasi harus dilakukan sejak awal perencanaan program. Dengan demikian, evaluasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi perbaikan kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, desain evaluasi program pendidikan bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga landasan strategis yang memastikan evaluasi berjalan sistematis, valid, reliabel, dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan.

B. Desain Eksperimen, Quasi-Eksperimen, dan Non-Eksperimen

Dalam evaluasi program pendidikan, desain penelitian dapat dibedakan menjadi eksperimen, quasi-eksperimen, dan non-eksperimen. Ketiga desain ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan kondisi di lapangan.

Desain eksperimen dianggap sebagai desain yang paling kuat untuk menguji hubungan sebab-akibat. Dalam desain ini, evaluator membagi subjek penelitian ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak. Kelompok eksperimen mendapatkan

perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Dengan membandingkan hasil keduanya, evaluator dapat menyimpulkan apakah suatu program benar-benar efektif.

Kelebihan desain eksperimen adalah kemampuannya memberikan kesimpulan kausal yang kuat. Misalnya, evaluasi program pelatihan guru dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja guru yang mengikuti pelatihan dengan yang tidak mengikuti. Namun, kelemahan desain ini adalah membutuhkan kontrol yang ketat dan sering kali sulit diterapkan di dunia pendidikan yang kompleks.

Quasi-eksperimen merupakan desain yang mirip dengan eksperimen, tetapi tanpa pembagian subjek secara acak. Evaluator menggunakan kelompok yang sudah ada untuk dijadikan kelompok eksperimen dan kontrol. Desain ini lebih fleksibel, namun kesimpulan kausalitasnya tidak sekuat eksperimen karena kemungkinan adanya faktor luar yang memengaruhi hasil.

Dalam pendidikan, quasi-eksperimen lebih sering digunakan karena lebih realistis. Misalnya, evaluator dapat membandingkan hasil belajar antara dua sekolah yang berbeda, di mana salah satu menerapkan kurikulum baru dan yang lain tidak. Meskipun tidak ada randomisasi, evaluasi tetap dapat memberikan informasi yang berguna.

Desain non-eksperimen adalah desain yang tidak melibatkan kelompok kontrol. Evaluasi hanya dilakukan pada satu kelompok, biasanya dengan metode survei, wawancara, atau observasi. Desain ini lebih sederhana

dan lebih mudah dilakukan, tetapi tidak dapat memberikan kesimpulan kausal yang kuat.

Meskipun demikian, desain non-eksperimen tetap penting dalam pendidikan. Misalnya, evaluasi kepuasan siswa terhadap program sekolah dapat dilakukan dengan survei tanpa perlu kelompok kontrol. Informasi ini tetap berharga untuk perbaikan layanan pendidikan.

Ketiga desain ini memiliki relevansi masing-masing. Desain eksperimen cocok untuk penelitian akademis yang membutuhkan bukti kausal, quasi-eksperimen untuk program pendidikan skala besar yang sulit dikontrol, dan non-eksperimen untuk evaluasi praktis yang lebih sederhana.

Pemilihan desain harus mempertimbangkan konteks, tujuan, dan sumber daya yang tersedia. Evaluasi pendidikan sering menghadapi keterbatasan, sehingga fleksibilitas dalam memilih desain menjadi penting.

Selain itu, pemilihan desain juga harus mempertimbangkan aspek etis. Misalnya, sulit untuk membagi siswa ke dalam kelompok kontrol yang tidak mendapatkan manfaat program tertentu karena hal itu dapat dianggap tidak adil. Oleh karena itu, desain quasi-eksperimen atau non-eksperimen sering kali lebih sesuai dalam konteks pendidikan.

Dengan memahami karakteristik ketiga desain ini, mahasiswa pascasarjana dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk penelitian atau evaluasi yang mereka lakukan. Dengan demikian, hasil evaluasi tetap valid, meskipun kondisi di lapangan tidak ideal.

Dengan demikian, desain eksperimen, quasi-eksperimen, dan non-eksperimen merupakan tiga

pilihan utama dalam evaluasi program pendidikan yang masing-masing memiliki kelebihan, keterbatasan, dan relevansi sesuai dengan konteksnya.

C. Desain Longitudinal dan *Cross-sectional*

Selain eksperimen, desain evaluasi program pendidikan juga dapat dibedakan menjadi longitudinal dan *cross-sectional.* Desain ini lebih berfokus pada dimensi waktu dalam evaluasi. Pemilihan desain yang tepat akan memengaruhi kedalaman dan luasnya informasi yang diperoleh.

Desain longitudinal adalah evaluasi yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu terhadap kelompok yang sama. Dengan desain ini, evaluator dapat melihat perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, menilai dampak program literasi digital pada siswa selama tiga tahun berturut-turut.

Kelebihan desain longitudinal adalah kemampuannya memberikan gambaran dinamis. Evaluator dapat melihat pola perubahan, tren, dan faktor yang memengaruhi perkembangan. Desain ini sangat berguna dalam menilai dampak jangka panjang program pendidikan.

Namun, kelemahan desain longitudinal adalah membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, ada risiko kehilangan responden (*attrition*) karena peserta keluar dari program atau pindah sekolah. Hal ini dapat memengaruhi validitas hasil.

Sebaliknya, desain *cross-sectional* hanya dilakukan sekali pada satu waktu tertentu. Evaluator

mengumpulkan data dari berbagai kelompok pada saat yang sama untuk memberikan gambaran kondisi saat itu. Misalnya, survei tentang kepuasan siswa terhadap kurikulum Merdeka Belajar pada tahun tertentu.

Kelebihan desain *cross-sectional* adalah lebih cepat dan murah. Desain ini cocok untuk memberikan gambaran umum atau *baseline* sebelum program dilaksanakan. Namun, kelemahannya adalah tidak dapat menunjukkan perubahan atau perkembangan jangka panjang.

Dalam pendidikan, kedua desain ini sama-sama relevan. Desain longitudinal cocok untuk program besar yang ingin dinilai dampaknya dalam jangka panjang, seperti program wajib belajar. Desain *cross-sectional* cocok untuk survei singkat atau evaluasi awal.

Pemilihan desain juga dapat menggabungkan keduanya. Misalnya, evaluasi kurikulum dapat dimulai dengan survei *cross-sectional*, lalu dilanjutkan dengan penelitian longitudinal untuk melihat dampaknya dalam jangka panjang.

Selain itu, desain longitudinal juga dapat dilakukan dalam bentuk panel, yaitu melacak individu yang sama dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perubahan.

Sementara desain *cross-sectional* lebih cocok untuk membandingkan antar kelompok. Misalnya, membandingkan hasil belajar antara sekolah perkotaan dan pedesaan pada saat yang sama. Informasi ini berguna untuk memahami kesenjangan pendidikan.

Dengan memahami perbedaan longitudinal dan *cross-sectional,* evaluator dapat memilih desain yang paling sesuai dengan tujuan evaluasi. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan dapat saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh.

Dengan demikian, desain longitudinal memberikan informasi tentang perubahan jangka panjang, sedangkan *cross-sectional* memberikan potret sesaat. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dalam menilai program pendidikan.

D. Penentuan Variabel dan Indikator Keberhasilan Program

Penentuan variabel dan indikator keberhasilan merupakan langkah penting dalam desain evaluasi program pendidikan. Variabel adalah aspek yang diukur dalam evaluasi, sedangkan indikator adalah ukuran spesifik yang digunakan untuk menilai variabel tersebut. Tanpa variabel dan indikator yang jelas, evaluasi tidak akan memiliki arah dan hasilnya sulit ditafsirkan.

Dalam evaluasi pendidikan, variabel biasanya mencakup input, proses, *output,* dan *outcome*. Input mencakup sumber daya seperti dana, guru, dan sarana prasarana. Proses mencakup pelaksanaan program, metode pembelajaran, dan manajemen sekolah. *Output* mencakup hasil langsung seperti nilai ujian atau tingkat kelulusan. *Outcome* mencakup dampak jangka panjang seperti kesiapan kerja atau kontribusi terhadap masyarakat.

Indikator keberhasilan harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas

waktu (SMART). Misalnya, indikator *output* dapat berupa peningkatan rata-rata nilai ujian sebesar 10% dalam satu tahun. Indikator *outcome* dapat berupa peningkatan persentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Pemilihan indikator harus sesuai dengan tujuan program. Jika tujuan program adalah meningkatkan literasi digital, maka indikator yang digunakan harus berkaitan dengan keterampilan digital siswa, bukan sekadar nilai ujian umum. Hal ini penting agar evaluasi benar-benar menilai aspek yang relevan.

Variabel dan indikator juga harus mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, di daerah terpencil, indikator keberhasilan mungkin lebih tepat difokuskan pada peningkatan angka kehadiran siswa daripada nilai ujian. Konteks ini penting agar hasil evaluasi sesuai dengan realitas di lapangan.

Penentuan variabel dan indikator juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Guru, siswa, orang tua, dan pemerintah perlu dilibatkan agar indikator yang dipilih benar-benar mencerminkan kebutuhan semua pihak. Partisipasi ini juga meningkatkan legitimasi hasil evaluasi.

Selain indikator kuantitatif, indikator kualitatif juga penting. Indikator kualitatif dapat berupa tingkat kepuasan siswa, motivasi belajar, atau perubahan sikap. Meskipun lebih sulit diukur, indikator kualitatif memberikan gambaran yang lebih holistik tentang keberhasilan program.

Dalam praktik, penentuan indikator sering menghadapi tantangan. Terlalu banyak indikator membuat evaluasi menjadi rumit, sedangkan terlalu

sedikit indikator membuat evaluasi kurang komprehensif. Oleh karena itu, keseimbangan diperlukan agar evaluasi tetap fokus namun menyeluruh.

Indikator juga harus bersifat adaptif. Seiring waktu, tujuan program dapat berubah, sehingga indikator perlu disesuaikan. Misalnya, pada masa pandemi, indikator keberhasilan pembelajaran bergeser dari pencapaian akademis ke keberhasilan implementasi pembelajaran daring.

Dengan penentuan variabel dan indikator yang tepat, evaluasi dapat memberikan informasi yang jelas tentang apakah program berhasil atau tidak. Tanpa itu, evaluasi hanya akan menghasilkan data yang tidak bermakna.

Dengan demikian, variabel dan indikator keberhasilan program merupakan elemen kunci dalam desain evaluasi pendidikan. Penentuan yang tepat akan memastikan bahwa evaluasi dapat menjawab pertanyaan penting tentang efektivitas program.

E. Validitas, Reliabilitas, dan Kredibilitas dalam Evaluasi

Validitas, reliabilitas, dan kredibilitas merupakan aspek penting dalam desain evaluasi program pendidikan. Ketiga aspek ini menentukan sejauh mana hasil evaluasi dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa validitas, reliabilitas, dan kredibilitas, evaluasi berisiko menghasilkan kesimpulan yang salah.

Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen evaluasi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika tujuan program adalah meningkatkan literasi digital, maka instrumen harus mengukur keterampilan digital siswa, bukan sekadar kemampuan membaca teks cetak. Validitas memastikan bahwa evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Validitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas isi memastikan bahwa instrumen mencakup semua aspek yang relevan. Validitas konstruk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Validitas kriteria memastikan bahwa hasil evaluasi sesuai dengan standar eksternal yang ada.

Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil evaluasi. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Misalnya, tes literasi yang reliabel akan menghasilkan skor yang konsisten meskipun dilakukan pada waktu berbeda. Reliabilitas penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh faktor kebetulan.

Reliabilitas dapat diuji melalui berbagai metode, seperti uji ulang (*test-retest*), konsistensi internal, atau uji antar-penilai. Dengan pengujian reliabilitas, evaluator dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar stabil dan dapat diandalkan.

Kredibilitas lebih banyak digunakan dalam evaluasi kualitatif. Kredibilitas mengacu pada sejauh mana hasil evaluasi dapat dipercaya oleh peserta dan

pembaca. Kredibilitas dapat diperoleh melalui triangulasi data, *member check,* atau keterlibatan evaluator dalam jangka waktu yang cukup.

Ketiga aspek ini saling terkait. Instrumen yang valid tetapi tidak reliabel tetap bermasalah karena hasilnya tidak konsisten. Instrumen yang reliabel tetapi tidak valid juga tidak berguna karena tidak mengukur hal yang seharusnya. Kredibilitas memperkuat kedua aspek tersebut dengan memastikan bahwa hasil evaluasi diterima oleh semua pihak.

Dalam konteks pendidikan, validitas, reliabilitas, dan kredibilitas sangat penting karena hasil evaluasi sering digunakan untuk kebijakan besar. Misalnya, evaluasi kurikulum dapat memengaruhi nasib jutaan siswa. Oleh karena itu, kesalahan dalam evaluasi dapat berdampak luas.

Upaya untuk menjaga validitas, reliabilitas, dan kredibilitas harus dilakukan sejak perencanaan desain evaluasi. Evaluator harus memilih instrumen yang tepat, melakukan uji coba, dan melibatkan berbagai teknik verifikasi.

Selain itu, integritas evaluator juga memengaruhi kredibilitas. Evaluator yang jujur, profesional, dan independen akan menghasilkan evaluasi yang lebih dapat dipercaya dibandingkan evaluator yang terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Dengan menjaga validitas, reliabilitas, dan kredibilitas, hasil evaluasi program pendidikan akan memiliki bobot akademis dan praktis yang tinggi. Hasil tersebut dapat digunakan dengan percaya diri oleh pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan masyarakat.

Dengan demikian, validitas, reliabilitas, dan kredibilitas merupakan pilar utama yang memastikan bahwa evaluasi program pendidikan benar-benar memberikan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

PENGUMPULAN DATA UNTUK EVALUASI PROGRAM

BAB 8

A. Strategi dan Teknik Pengumpulan Data (Kuesioner, Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam evaluasi program pendidikan karena kualitas data menentukan kualitas hasil evaluasi. Data yang valid, reliabel, dan relevan hanya dapat diperoleh melalui strategi dan teknik pengumpulan yang tepat. Dalam praktiknya, terdapat beberapa teknik umum yang digunakan, yaitu kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kuesioner adalah instrumen tertulis yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh responden. Teknik ini cocok untuk mengumpulkan data dari populasi besar dalam waktu relatif singkat. Dalam evaluasi pendidikan, kuesioner sering digunakan untuk menilai kepuasan siswa, persepsi guru terhadap kurikulum, atau pandangan orang tua tentang kualitas layanan sekolah.

Kelebihan kuesioner adalah efisiensi, namun kelemahannya adalah potensi bias responden. Tidak semua responden memberikan jawaban yang jujur atau akurat. Oleh karena itu, kuesioner harus disusun dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, situasi, atau proses yang terjadi di lapangan. Dalam evaluasi pendidikan, observasi dapat digunakan untuk menilai interaksi guru dan siswa, implementasi kurikulum, atau penggunaan sarana belajar. Observasi dapat bersifat partisipatif maupun nonpartisipatif.

Kelebihan observasi adalah mampu menangkap data nyata sesuai kondisi lapangan. Namun, kelemahannya adalah adanya subjektivitas pengamat dan keterbatasan waktu. Untuk mengurangi bias, observasi sebaiknya dilakukan dengan instrumen baku, seperti lembar observasi atau rubrik penilaian.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara evaluator dan responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Dalam evaluasi pendidikan, wawancara digunakan untuk menggali pendapat guru, siswa, kepala sekolah, atau pejabat terkait.

Kelebihan wawancara adalah kemampuannya menggali informasi mendalam, termasuk aspek yang tidak dapat diungkap melalui kuesioner. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu lebih banyak dan keterampilan evaluator dalam bertanya serta menjaga objektivitas.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau arsip yang ada. Dalam evaluasi pendidikan, dokumentasi dapat berupa data nilai siswa, laporan keuangan sekolah, kebijakan kurikulum, atau catatan kegiatan pembelajaran.

Kelebihan dokumentasi adalah data yang relatif objektif karena berasal dari sumber tertulis. Namun, kelemahannya adalah tidak semua dokumen tersedia atau lengkap. Evaluator harus mampu menyeleksi dokumen yang relevan dan kredibel.

Strategi pengumpulan data yang baik biasanya melibatkan kombinasi beberapa teknik. Misalnya, evaluasi program BOS menggunakan kuesioner untuk siswa, wawancara dengan kepala sekolah, observasi terhadap penggunaan fasilitas, dan analisis dokumen laporan keuangan. Kombinasi ini menghasilkan data yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, pemilihan strategi dan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi, karakteristik responden, serta sumber daya yang tersedia. Evaluasi yang baik selalu mengutamakan keandalan teknik pengumpulan data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Populasi dan Sampel dalam Evaluasi Pendidikan

Populasi dalam evaluasi pendidikan adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran evaluasi. Populasi dapat berupa siswa, guru, sekolah, program, atau bahkan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, evaluator biasanya tidak meneliti seluruh populasi, melainkan mengambil sebagian yang disebut sampel.

Pemilihan sampel sangat penting karena sampel harus mewakili populasi secara akurat. Jika sampel tidak representatif, hasil evaluasi berpotensi bias dan tidak dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penentuan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat.

Metode pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling* memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih, misalnya melalui *random sampling*. Teknik ini dianggap paling objektif karena mengurangi bias.

Random sampling dapat dilakukan dengan undian, tabel angka acak, atau *software* statistik. Dalam evaluasi pendidikan, teknik ini cocok untuk memilih siswa dari seluruh sekolah di suatu daerah secara acak. Dengan cara ini, hasil evaluasi lebih mudah digeneralisasi.

Stratified random sampling digunakan ketika populasi terbagi dalam strata tertentu, misalnya sekolah kota dan desa, atau siswa laki-laki dan perempuan. Teknik ini membantu memastikan semua kelompok terwakili dalam sampel.

Cluster sampling digunakan jika populasi sangat besar dan tersebar luas. Misalnya, evaluator dapat memilih beberapa sekolah sebagai klaster, kemudian meneliti semua siswa dalam klaster tersebut. Teknik ini lebih efisien, meski tingkat akurasi lebih rendah dibanding *random sampling.*

Non-probability sampling digunakan jika sulit melakukan pengambilan sampel acak. Contohnya adalah *purposive sampling,* di mana evaluator memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, memilih sekolah percontohan untuk evaluasi kurikulum.

Snowball sampling juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama untuk menjangkau responden yang sulit ditemukan. Misalnya, evaluator meminta rekomendasi guru untuk menemukan siswa

yang memiliki pengalaman khusus terkait program tertentu.

Dalam evaluasi pendidikan, ukuran sampel juga harus diperhatikan. Sampel yang terlalu kecil tidak dapat mewakili populasi, sementara sampel yang terlalu besar membutuhkan sumber daya lebih banyak. Oleh karena itu, penentuan ukuran sampel harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan ketersediaan sumber daya.

Populasi dan sampel juga harus mempertimbangkan etika. Responden harus dipilih dengan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, partisipasi responden harus berdasarkan persetujuan sukarela.

Dengan demikian, populasi dan sampel merupakan komponen penting dalam evaluasi pendidikan. Pemilihan yang tepat akan menghasilkan data yang valid, reliabel, dan dapat digeneralisasikan untuk kepentingan kebijakan dan praktik pendidikan.

C. Instrumen Evaluasi: Penyusunan dan Uji Validitas

Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dapat berupa tes, kuesioner, lembar observasi, pedoman wawancara, atau daftar cek dokumen. Penyusunan instrumen yang baik sangat penting karena kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang diperoleh.

Penyusunan instrumen harus dimulai dengan merumuskan tujuan evaluasi. Tujuan ini akan menentukan variabel dan indikator yang diukur. Misalnya, jika evaluasi bertujuan menilai efektivitas program literasi, maka indikatornya bisa berupa

kemampuan membaca, frekuensi membaca, dan motivasi siswa.

Setelah indikator ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun item instrumen. Item harus jelas, sederhana, dan sesuai dengan indikator. Dalam kuesioner, item dapat berbentuk pertanyaan terbuka atau tertutup. Pertanyaan tertutup lebih mudah dianalisis, sementara pertanyaan terbuka memungkinkan jawaban yang lebih mendalam.

Instrumen juga harus mempertimbangkan format skala. Skala Likert sering digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap atau persepsi. Skala ini memudahkan analisis statistik dan memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih variatif.

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat diuji dengan berbagai cara, seperti validitas isi, konstruk, dan kriteria. Validitas isi diuji dengan meminta ahli menilai kesesuaian item dengan indikator. Validitas konstruk diuji dengan analisis faktor, sedangkan validitas kriteria diuji dengan membandingkan hasil instrumen dengan standar eksternal.

Selain validitas, reliabilitas juga harus diuji. Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil instrumen. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Reliabilitas dapat diuji dengan metode *alpha Cronbach, test-retest,* atau *split-half.*

Penyusunan instrumen juga harus memperhatikan aspek etika. Pertanyaan tidak boleh menyinggung privasi atau merugikan responden.

Instrumen harus disusun dengan bahasa yang sopan, inklusif, dan tidak diskriminatif.

Dalam praktiknya, instrumen sering diuji coba sebelum digunakan secara luas. Uji coba ini bertujuan melihat apakah responden memahami item, apakah instrumen praktis digunakan, dan apakah hasilnya valid serta reliabel.

Instrumen juga harus fleksibel agar dapat digunakan dalam berbagai konteks. Misalnya, instrumen evaluasi kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah di perkotaan maupun pedesaan.

Dengan instrumen yang valid dan reliabel, evaluasi program pendidikan dapat menghasilkan data yang akurat. Data ini kemudian menjadi dasar kuat untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi kebijakan.

Dengan demikian, penyusunan instrumen dan uji validitas adalah langkah krusial yang memastikan evaluasi program pendidikan benar-benar mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

D. Etika dalam Pengumpulan Data Evaluasi

Etika merupakan aspek fundamental dalam pengumpulan data evaluasi program pendidikan. Evaluasi tidak hanya menuntut ketepatan metodologis, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai moral dan hak-hak responden. Tanpa etika, evaluasi dapat menimbulkan kerugian, pelanggaran privasi, atau ketidakpercayaan dari masyarakat.

Prinsip utama dalam etika pengumpulan data adalah *informed consent.* Responden harus diberi

informasi yang jelas tentang tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko evaluasi sebelum mereka memutuskan untuk berpartisipasi. Persetujuan responden harus diperoleh secara sukarela tanpa paksaan.

Kerahasiaan data responden juga harus dijaga. Informasi pribadi, seperti nama, alamat, atau data sensitif lainnya, tidak boleh disebarkan tanpa izin. Evaluator harus menggunakan kode atau anonimitas untuk melindungi identitas responden.

Prinsip *nonmaleficence,* yaitu tidak menimbulkan kerugian, juga penting. Evaluasi tidak boleh menyebabkan stres, diskriminasi, atau stigma bagi responden. Misalnya, evaluasi terhadap siswa tidak boleh membuat mereka merasa dipermalukan atau direndahkan.

Prinsip *beneficence* menekankan bahwa evaluasi harus memberikan manfaat bagi responden atau masyarakat luas. Evaluasi tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi harus berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Keadilan juga merupakan prinsip etis yang penting. Semua responden harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan gender, etnis, agama, atau latar belakang sosial. Pemilihan sampel harus dilakukan secara adil dan transparan.

Evaluator juga harus bersikap jujur dan transparan. Data tidak boleh dimanipulasi untuk mendukung kepentingan tertentu. Hasil evaluasi harus dilaporkan apa adanya, baik jika hasilnya positif maupun negatif. Integritas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dalam praktik, dilema etis sering kali muncul. Misalnya, apakah siswa perlu mengetahui bahwa mereka sedang diamati dalam evaluasi kelas. Dalam kasus seperti ini, evaluator harus mencari solusi yang seimbang antara kebutuhan penelitian dan hak-hak siswa.

Aspek etika juga mencakup tanggung jawab evaluator dalam menyampaikan hasil. Laporan evaluasi harus disampaikan dengan bahasa yang konstruktif agar tidak merugikan pihak tertentu. Kritik harus disertai dengan rekomendasi perbaikan.

Regulasi juga mendukung etika dalam evaluasi. Di Indonesia, penelitian dan evaluasi biasanya harus mendapatkan izin dari lembaga berwenang, seperti dinas pendidikan atau komite etik universitas. Proses ini memastikan bahwa evaluasi mematuhi standar etis yang berlaku.

Dengan menjunjung tinggi etika, evaluasi program pendidikan tidak hanya menghasilkan data yang valid, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Evaluasi yang etis akan lebih mudah diterima dan digunakan sebagai dasar kebijakan.

Dengan demikian, etika dalam pengumpulan data evaluasi adalah landasan moral yang menjamin evaluasi berjalan secara adil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Studi Kasus: Pengumpulan Data Evaluasi Program Sekolah

Untuk memahami penerapan strategi pengumpulan data dalam evaluasi, penting melihat contoh nyata di

lapangan. Salah satu studi kasus relevan adalah evaluasi Program Sekolah Penggerak (PSP) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru.

Dalam evaluasi PSP, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik. Kuesioner disebarkan kepada guru dan kepala sekolah untuk menilai persepsi mereka tentang pelatihan dan dukungan yang diberikan pemerintah. Kuesioner ini menggunakan *Skala Likert* untuk memudahkan analisis kuantitatif.

Observasi dilakukan di kelas untuk melihat bagaimana guru mengimplementasikan strategi pembelajaran baru yang dipelajari dalam program. Observasi ini memberikan data nyata tentang perubahan praktik pembelajaran, seperti penggunaan metode aktif, pemanfaatan teknologi, atau pendekatan diferensiasi.

Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menggali pengalaman mereka. Kepala sekolah memberikan informasi tentang tantangan manajerial, guru berbagi tentang perubahan pedagogis, dan siswa menyampaikan pengalaman belajar mereka.

Dokumentasi juga menjadi sumber data penting. Evaluator mengumpulkan laporan kegiatan sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), catatan hasil belajar siswa, serta laporan keuangan yang terkait dengan program. Dokumen ini memberikan bukti objektif yang melengkapi data kuesioner, observasi, dan wawancara.

Populasi evaluasi adalah seluruh sekolah yang mengikuti PSP, tetapi karena keterbatasan, evaluator mengambil sampel sekolah dari beberapa provinsi. Sampel dipilih dengan *stratified random sampling* agar mewakili daerah perkotaan dan pedesaan.

Instrumen evaluasi diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Misalnya, pertanyaan dalam kuesioner divalidasi oleh pakar pendidikan, sedangkan reliabilitas diuji dengan uji *alpha Cronbach.* Hal ini memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur aspek yang relevan.

Etika juga dijaga dalam pengumpulan data. Guru dan siswa diberi penjelasan tentang tujuan evaluasi dan memberikan persetujuan sebelum berpartisipasi. Identitas responden dijaga kerahasiaannya agar mereka merasa aman dalam memberikan jawaban.

Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial, sementara data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis dengan teknik *coding* tematik. Kombinasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program meningkatkan kapasitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran aktif. Namun, tantangan muncul dalam keterbatasan fasilitas di sekolah tertentu, sehingga implementasi tidak seragam. Informasi ini sangat berguna sebagai *feedback* untuk perbaikan kebijakan.

Studi kasus ini memperlihatkan pentingnya kombinasi teknik pengumpulan data. Tidak ada satu teknik yang cukup untuk memahami kompleksitas

program pendidikan. Evaluasi yang baik selalu mengandalkan triangulasi data dari berbagai sumber.

Dengan demikian, studi kasus evaluasi PSP menegaskan bahwa pengumpulan data yang sistematis, valid, reliabel, dan etis sangat penting untuk menghasilkan evaluasi yang akurat dan bermanfaat. Hal ini dapat menjadi model bagi evaluasi program pendidikan lain di Indonesia.

ANALISIS DATA EVALUASI PROGRAM

BAB 9

A. Analisis Kuantitatif: Statistik Deskriptif dan Inferensial

Analisis kuantitatif merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam evaluasi program pendidikan karena mampu memberikan gambaran objektif dalam bentuk angka. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti rata-rata, median, modus, persentase, dan standar deviasi. Dengan analisis deskriptif, evaluator dapat memahami pola umum dari data, misalnya tingkat kepuasan siswa terhadap program atau distribusi nilai ujian.

Statistik deskriptif bermanfaat untuk menyajikan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Misalnya, hasil survei kepuasan guru terhadap kurikulum baru dapat ditampilkan dalam bentuk rata-rata skor dari *skala likert.* Informasi ini memudahkan pembuat kebijakan untuk memahami pandangan mayoritas guru secara ringkas.

Selain deskriptif, analisis kuantitatif juga mencakup statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Dengan teknik ini, evaluator

dapat menguji hipotesis, melihat perbedaan antara kelompok, atau mengukur hubungan antarvariabel.

Teknik statistik inferensial yang umum digunakan antara lain uji-t, ANOVA, regresi, dan korelasi. Misalnya, evaluator dapat menggunakan regresi untuk menilai apakah pelatihan guru berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dengan cara ini, evaluasi mampu memberikan bukti empiris mengenai efektivitas program.

Penggunaan statistik inferensial sangat penting dalam evaluasi pendidikan karena memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data. Tanpa inferensi, evaluasi hanya akan berhenti pada deskripsi tanpa mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat atau pola yang lebih kompleks.

Namun, penggunaan analisis kuantitatif memerlukan kehati-hatian. Data harus memenuhi asumsi statistik yang digunakan. Jika tidak, hasil analisis dapat menyesatkan. Misalnya, uji regresi membutuhkan asumsi linearitas dan normalitas yang harus diuji terlebih dahulu.

Selain itu, kualitas data sangat menentukan. Data yang tidak lengkap atau bias dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru meskipun menggunakan teknik statistik yang canggih. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data harus dilakukan dengan teliti.

Analisis kuantitatif juga memungkinkan perbandingan antar kelompok atau periode waktu. Misalnya, evaluator dapat membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya kurikulum baru. Dengan analisis ini, dampak program dapat terlihat lebih jelas.

Dalam praktiknya, analisis kuantitatif sering dipadukan dengan visualisasi data. Grafik, tabel, dan diagram membantu memperjelas temuan statistik sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Visualisasi juga memperkuat komunikasi hasil evaluasi kepada publik.

Penggunaan *software* statistik seperti SPSS, Stata, atau R mempermudah proses analisis kuantitatif. Dengan teknologi ini, analisis dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan kompleks. Namun, evaluator harus tetap memahami logika dasar analisis agar tidak salah dalam menafsirkan hasil.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, analisis kuantitatif sangat penting karena data pendidikan umumnya berskala besar. Survei nasional, ujian standar, dan data administrasi sekolah menyediakan informasi masif yang hanya dapat dianalisis dengan pendekatan kuantitatif.

Dengan demikian, analisis kuantitatif melalui statistik deskriptif dan inferensial merupakan instrumen utama dalam mengevaluasi program pendidikan. Analisis ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Analisis Kualitatif: *Coding,* Kategorisasi, dan Analisis Tematik

Analisis kualitatif dalam evaluasi program pendidikan digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan persepsi dari responden. Berbeda dengan kuantitatif yang menekankan pada angka, analisis kualitatif berfokus pada teks, narasi, dan fenomena sosial.

Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana program dirasakan dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan.

Langkah awal analisis kualitatif adalah *coding,* yaitu proses memberi kode pada data mentah seperti transkrip wawancara atau catatan observasi. Kode ini berfungsi sebagai label untuk mengelompokkan informasi yang relevan. Misalnya, jawaban guru yang menyebutkan "kesulitan menggunakan teknologi" dapat diberi kode "tantangan digital".

Setelah *coding,* langkah berikutnya adalah kategorisasi. Kode-kode yang mirip atau berkaitan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Misalnya, kategori "kendala implementasi kurikulum" dapat mencakup kode seperti "keterbatasan pelatihan", "kurangnya fasilitas", dan "resistensi guru".

Analisis tematik dilakukan setelah kategorisasi. Evaluator mencari tema-tema utama yang muncul dari data. Tema ini merepresentasikan pola umum yang relevan dengan tujuan evaluasi. Misalnya, tema "kesiapan guru" dapat mencakup berbagai kategori yang berkaitan dengan kompetensi, motivasi, dan dukungan sekolah.

Analisis kualitatif menuntut keterampilan interpretasi yang tinggi. Evaluator harus mampu membaca makna di balik kata-kata responden tanpa menambahkan bias pribadi. Oleh karena itu, triangulasi data dan diskusi dengan tim evaluasi sering diperlukan untuk meningkatkan keabsahan analisis.

Kelebihan analisis kualitatif adalah kemampuannya menggali informasi yang tidak dapat diungkap dengan angka. Misalnya, wawancara siswa

dapat menunjukkan bagaimana mereka merasakan perubahan kurikulum, sesuatu yang sulit diukur secara kuantitatif.

Namun, analisis kualitatif juga memiliki keterbatasan. Prosesnya lebih memakan waktu, membutuhkan keahlian khusus, dan hasilnya sulit digeneralisasikan. Meskipun demikian, analisis ini sangat penting untuk memahami konteks dan pengalaman nyata di lapangan.

Software analisis kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti dapat membantu proses *coding,* kategorisasi, dan tematisasi. Dengan bantuan teknologi, analisis dapat dilakukan lebih sistematis meski tetap memerlukan interpretasi manusia.

Dalam pendidikan, analisis kualitatif sangat relevan untuk mengevaluasi aspek non-akademis, seperti iklim sekolah, motivasi guru, atau kepuasan siswa. Informasi ini sering kali lebih kaya dibandingkan data kuantitatif semata.

Analisis kualitatif juga memungkinkan eksplorasi isu yang tidak terduga. Misalnya, wawancara siswa dapat mengungkap masalah baru yang tidak diperkirakan dalam desain evaluasi. Dengan demikian, analisis ini bersifat fleksibel dan adaptif.

Dengan *coding,* kategorisasi, dan analisis tematik, evaluator dapat membangun narasi yang komprehensif tentang program pendidikan. Narasi ini melengkapi hasil kuantitatif dan memberikan gambaran utuh tentang keberhasilan maupun tantangan program.

Dengan demikian, analisis kualitatif menjadi bagian penting dari evaluasi program pendidikan.

Pendekatan ini memastikan bahwa suara para pemangku kepentingan, terutama yang berada di lapangan, benar-benar terwakili dalam hasil evaluasi.

C. Triangulasi Data dalam Evaluasi Pendidikan

Triangulasi data adalah strategi penting dalam evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dengan triangulasi, evaluator dapat mengurangi risiko bias yang mungkin muncul jika hanya mengandalkan satu sumber data.

Jenis triangulasi yang paling umum adalah triangulasi sumber. Evaluator membandingkan data dari berbagai responden, misalnya guru, siswa, dan kepala sekolah. Jika semua pihak memberikan informasi yang serupa, maka hasil evaluasi menjadi lebih kredibel. Namun, jika terdapat perbedaan, hal itu justru dapat mengungkap aspek penting yang perlu diteliti lebih lanjut.

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Misalnya, evaluasi program BOS dapat menggunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi siswa, wawancara dengan kepala sekolah, dan observasi penggunaan dana di sekolah. Dengan menggabungkan metode ini, evaluasi menjadi lebih komprehensif.

Triangulasi peneliti melibatkan lebih dari satu evaluator untuk menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk mengurangi subjektivitas. Dengan adanya tim

evaluator, hasil analisis dapat dibandingkan dan didiskusikan sehingga lebih objektif.

Selain itu, terdapat triangulasi teori yang menggunakan perspektif teoretis berbeda dalam menganalisis data. Misalnya, evaluasi kurikulum dapat dianalisis dengan teori konstruktivisme sekaligus teori *behaviorisme.* Dengan pendekatan multi-teori, hasil evaluasi lebih kaya dan mendalam.

Triangulasi juga dapat dilakukan secara waktu. Evaluator mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi hasil. Misalnya, survei kepuasan siswa dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun ajaran. Jika hasilnya konsisten, maka kredibilitas evaluasi meningkat.

Kelebihan triangulasi adalah memperkuat keabsahan hasil evaluasi. Informasi yang diverifikasi melalui berbagai cara lebih dapat dipercaya dibandingkan informasi tunggal. Hal ini penting terutama dalam evaluasi pendidikan yang kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Namun, triangulasi juga membutuhkan sumber daya lebih besar. Menggunakan banyak metode atau peneliti membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga tambahan. Oleh karena itu, triangulasi harus direncanakan secara proporsional sesuai kebutuhan evaluasi.

Dalam praktiknya, triangulasi sering menghasilkan temuan baru. Misalnya, kuesioner siswa menunjukkan kepuasan tinggi, tetapi observasi menunjukkan rendahnya partisipasi siswa di kelas. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor yang tidak

terungkap dalam survei, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut.

Triangulasi juga mendukung integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif memberikan gambaran umum, sementara data kualitatif memberikan konteks dan penjelasan. Dengan triangulasi, kedua jenis data ini dapat saling melengkapi.

Dalam konteks evaluasi pendidikan di Indonesia, triangulasi sangat relevan karena kondisi pendidikan yang beragam. Perbedaan antara sekolah kota dan desa, negeri dan swasta, atau pusat dan daerah hanya dapat dipahami melalui triangulasi data.

Dengan demikian, triangulasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas, memperkaya temuan, dan memastikan hasil evaluasi benar-benar mencerminkan realitas pendidikan.

D. Interpretasi Hasil Evaluasi dan Penyusunan Kesimpulan

Interpretasi hasil evaluasi adalah proses menafsirkan data yang telah dianalisis untuk memberikan makna yang relevan dengan tujuan evaluasi. Data tanpa interpretasi hanyalah angka atau teks mentah yang belum bermanfaat. Oleh karena itu, interpretasi menjadi tahap penting untuk menghubungkan temuan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan program.

Interpretasi hasil evaluasi harus mempertimbangkan konteks. Misalnya, peningkatan nilai ujian sebesar 5% mungkin terlihat kecil, tetapi bisa sangat berarti jika dicapai di sekolah dengan

keterbatasan fasilitas. Dengan mempertimbangkan konteks, interpretasi menjadi lebih adil dan akurat.

Selain konteks, interpretasi juga harus memperhatikan keterbatasan data. Evaluator harus jujur menyampaikan bahwa hasil evaluasi mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terkontrol. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan kredibilitas.

Interpretasi juga melibatkan analisis pola dan hubungan antarvariabel. Misalnya, hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas pelatihan guru dengan hasil belajar siswa. Interpretasi yang tepat akan menyimpulkan bahwa pelatihan guru berkontribusi terhadap mutu pembelajaran.

Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil interpretasi. Kesimpulan harus disusun secara singkat, jelas, dan langsung menjawab tujuan evaluasi. Kesimpulan juga harus logis dan konsisten dengan data yang dianalisis.

Dalam menyusun kesimpulan, evaluator perlu membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah hasil yang didukung data, sedangkan opini adalah interpretasi subjektif. Kesimpulan harus didasarkan pada fakta agar dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan juga harus bersifat praktis dan aplikatif. Misalnya, kesimpulan bahwa kurikulum baru berhasil meningkatkan kreativitas siswa harus diikuti dengan rekomendasi bagaimana mempertahankan keberhasilan tersebut.

Selain kesimpulan utama, evaluator juga dapat menyusun kesimpulan tambahan yang memberikan

wawasan lebih luas. Misalnya, evaluasi program BOS mungkin menyimpulkan bahwa dana digunakan dengan baik, tetapi juga menemukan masalah administrasi yang perlu diperbaiki.

Interpretasi dan kesimpulan harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif. Laporan evaluasi ditujukan tidak hanya untuk akademisi, tetapi juga untuk pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami tanpa mengurangi ketelitian ilmiah.

Kesimpulan juga harus menghindari generalisasi berlebihan. Jika sampel terbatas, kesimpulan tidak boleh digeneralisasi ke seluruh populasi. Evaluator harus menjelaskan batasan temuan agar tidak disalahartikan.

Dengan interpretasi yang tepat, hasil evaluasi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program. Kesimpulan yang disusun secara hati-hati akan menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, interpretasi hasil evaluasi dan penyusunan kesimpulan merupakan tahap penting yang menjembatani antara data dan kebijakan. Tanpa interpretasi yang baik, hasil evaluasi tidak akan memberikan manfaat nyata.

E. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

Rekomendasi kebijakan adalah *output* penting dari evaluasi program pendidikan. Rekomendasi ini berfungsi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil langkah perbaikan. Agar efektif,

rekomendasi harus berbasis bukti, relevan dengan temuan evaluasi, dan realistis untuk dilaksanakan.

Penyusunan rekomendasi dimulai dengan mengidentifikasi temuan utama dari evaluasi. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan guru meningkatkan hasil belajar siswa, maka rekomendasi dapat berupa peningkatan frekuensi atau kualitas pelatihan guru. Dengan demikian, rekomendasi langsung terkait dengan data.

Rekomendasi harus bersifat spesifik dan operasional. Hindari rekomendasi yang terlalu umum seperti "tingkatkan mutu pendidikan". Sebaliknya, rekomendasi harus menjelaskan tindakan yang jelas, seperti "menyediakan modul pelatihan berbasis teknologi untuk guru di daerah terpencil".

Selain spesifik, rekomendasi juga harus realistis. Evaluator perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, baik anggaran, waktu, maupun tenaga. Rekomendasi yang tidak realistis berisiko diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Rekomendasi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan perlunya perubahan kurikulum, rekomendasi harus memperhitungkan resistensi dari guru atau masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi sebaiknya disertai strategi implementasi.

Rekomendasi yang baik juga harus berorientasi pada keberlanjutan. Evaluasi tidak hanya menilai program saat ini, tetapi juga memberikan panduan untuk jangka panjang. Misalnya, rekomendasi tentang BOS tidak hanya fokus pada distribusi dana, tetapi juga

pada mekanisme transparansi dan akuntabilitas di masa depan.

Selain itu, rekomendasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Rekomendasi yang hanya menguntungkan satu pihak berpotensi menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang inklusif dan adil.

Penyusunan rekomendasi juga perlu memprioritaskan masalah. Tidak semua temuan dapat ditindaklanjuti sekaligus. Evaluator harus mengurutkan rekomendasi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

Dalam praktiknya, rekomendasi dapat disusun dalam bentuk kebijakan makro maupun mikro. Kebijakan makro mencakup regulasi nasional, sementara kebijakan mikro mencakup perbaikan di tingkat sekolah atau daerah. Keduanya penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Komunikasi rekomendasi juga penting. Rekomendasi harus disampaikan dalam format yang mudah dipahami pembuat kebijakan, misalnya ringkasan eksekutif atau *policy brief*. Dengan cara ini, rekomendasi lebih mungkin diperhatikan dan diimplementasikan.

Dengan rekomendasi yang berbasis bukti, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Evaluasi tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi alat nyata untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Dengan demikian, penyusunan rekomendasi berbasis bukti merupakan tahap akhir yang memastikan hasil evaluasi benar-benar berkontribusi pada perbaikan kebijakan. Evaluasi yang tidak menghasilkan rekomendasi praktis berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM

BAB 10

A. Struktur Laporan Evaluasi Program Pendidikan

Laporan evaluasi program pendidikan merupakan dokumen resmi yang menyajikan hasil evaluasi secara sistematis, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur laporan menjadi pedoman utama agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pembaca, terutama para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Tanpa struktur yang jelas, laporan akan sulit dimanfaatkan secara optimal.

Struktur laporan umumnya dimulai dengan halaman judul yang mencantumkan judul laporan, nama evaluator, lembaga penyelenggara, serta tahun penyusunan. Halaman judul berfungsi memberikan identitas formal pada laporan evaluasi sehingga dapat digunakan sebagai dokumen resmi dalam forum akademis maupun birokrasi.

Setelah halaman judul, laporan biasanya memuat kata pengantar. Bagian ini berisi penjelasan singkat dari evaluator tentang tujuan penyusunan laporan, pihak-pihak yang terlibat, serta ucapan terima kasih kepada responden, instansi terkait, dan sponsor program. Kata pengantar berfungsi sebagai pembuka yang menegaskan pentingnya evaluasi.

Daftar isi menjadi bagian penting berikutnya. Fungsi daftar isi adalah memudahkan pembaca menemukan bagian tertentu dari laporan. Selain daftar isi, kadang dilengkapi daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Hal ini mempermudah navigasi laporan yang panjang.

Bagian inti laporan diawali dengan ringkasan eksekutif. Bagian ini menyajikan gambaran umum tentang tujuan, metode, temuan utama, dan rekomendasi. Ringkasan eksekutif sangat penting karena sering kali menjadi bagian pertama dan utama yang dibaca oleh pengambil keputusan.

Bab pendahuluan biasanya mencakup latar belakang, tujuan evaluasi, ruang lingkup, dan metode yang digunakan. Bagian ini menjelaskan mengapa evaluasi dilakukan, apa yang ingin dicapai, serta bagaimana evaluasi dilaksanakan. Dengan pendahuluan yang jelas, pembaca memahami konteks evaluasi secara utuh.

Bab hasil evaluasi menjadi inti dari laporan. Bagian ini menyajikan temuan berdasarkan analisis data. Hasil harus disajikan secara runtut, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta dilengkapi dengan tabel, grafik, atau kutipan responden untuk memperkuat temuan.

Setelah hasil, laporan memuat bagian diskusi atau pembahasan. Bagian ini berfungsi menafsirkan temuan dalam kerangka teori atau kebijakan yang relevan. Diskusi memberikan makna lebih dalam dari data mentah dan menghubungkannya dengan tujuan evaluasi.

Bab kesimpulan menyajikan ringkasan temuan utama yang menjawab tujuan evaluasi. Kesimpulan

harus disusun singkat, jelas, dan berbasis data. Kesimpulan yang baik akan membantu pembuat kebijakan memahami inti evaluasi dengan cepat.

Bab rekomendasi berisi saran perbaikan atau langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Rekomendasi harus realistis, operasional, dan sesuai dengan temuan. Rekomendasi inilah yang diharapkan dapat memengaruhi kebijakan pendidikan ke depan.

Lampiran menjadi bagian akhir laporan. Lampiran dapat berisi instrumen evaluasi, data mentah, transkrip wawancara, atau dokumen pendukung lainnya. Lampiran memperkuat transparansi laporan dan memungkinkan pihak lain meninjau ulang proses evaluasi.

Dengan struktur yang sistematis, laporan evaluasi program pendidikan dapat berfungsi tidak hanya sebagai dokumen akademis, tetapi juga sebagai alat strategis untuk perbaikan kebijakan dan program. Struktur inilah yang akan memastikan laporan bermanfaat dan digunakan secara luas.

B. Penyusunan Ringkasan Eksekutif dan Temuan Utama

Ringkasan eksekutif adalah bagian yang merangkum seluruh isi laporan dalam bentuk yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Ringkasan eksekutif biasanya terdiri dari dua hingga lima halaman yang menyajikan inti dari evaluasi, mulai dari tujuan, metodologi, hasil utama, hingga rekomendasi. Bagian ini sangat penting karena sering menjadi bahan pertama yang dibaca oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterbatasan waktu.

Tujuan utama ringkasan eksekutif adalah memberikan gambaran umum yang cepat tentang isi laporan tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Dengan membaca ringkasan eksekutif, pembuat kebijakan sudah dapat memahami apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan langkah apa yang disarankan selanjutnya.

Ringkasan eksekutif harus disusun secara jelas dan komunikatif. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana tanpa mengorbankan substansi. Kalimat harus ringkas, namun tetap mencerminkan hasil evaluasi yang kompleks. Dengan gaya penulisan seperti ini, ringkasan eksekutif dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Bagian pertama ringkasan eksekutif sebaiknya memuat tujuan evaluasi. Misalnya, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program BOS dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Tujuan harus ditulis secara eksplisit agar pembaca langsung memahami arah evaluasi.

Setelah itu, ringkasan eksekutif harus menjelaskan metodologi evaluasi secara singkat. Cukup disebutkan teknik pengumpulan data, jumlah responden, serta pendekatan analisis yang digunakan. Penjelasan metodologi tidak perlu detail, karena detail sudah terdapat pada bagian utama laporan.

Bagian inti ringkasan eksekutif adalah temuan utama. Temuan harus disajikan dalam bentuk poin-poin yang jelas dan berbasis data. Misalnya, “Dana BOS meningkatkan partisipasi sekolah sebesar 15%”, atau “Sebanyak 70% guru merasa terbantu dengan kebijakan

Merdeka Belajar". Data konkret membuat ringkasan lebih meyakinkan.

Selain temuan positif, ringkasan eksekutif juga harus mencantumkan kelemahan program. Transparansi ini penting agar pembuat kebijakan menyadari masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, "Masih terdapat 20% sekolah yang belum mampu melaporkan penggunaan dana BOS secara transparan".

Bagian terakhir ringkasan eksekutif berisi rekomendasi utama. Rekomendasi harus singkat, operasional, dan langsung terkait dengan temuan. Misalnya, "Pemerintah perlu memperkuat pelatihan manajemen keuangan bagi sekolah penerima BOS". Dengan rekomendasi ini, pembuat kebijakan memiliki arahan tindak lanjut.

Ringkasan eksekutif juga harus memuat implikasi kebijakan. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan ketimpangan antar daerah, implikasinya adalah perlunya kebijakan afirmatif yang lebih kuat untuk daerah tertinggal. Implikasi ini membuat ringkasan lebih strategis.

Penyusunan ringkasan eksekutif harus dilakukan setelah laporan lengkap selesai. Hal ini penting agar ringkasan benar-benar mencerminkan isi laporan. Menulis ringkasan eksekutif di awal berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan isi laporan.

Dengan ringkasan eksekutif yang baik, laporan evaluasi akan lebih mudah dipahami, lebih efektif dikomunikasikan, dan lebih mungkin digunakan oleh pengambil keputusan. Bagian ini ibarat pintu masuk utama yang menentukan apakah laporan akan dibaca lebih lanjut atau tidak.

C. Penyajian Data dan Analisis dalam Laporan

Penyajian data dalam laporan evaluasi program pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan informatif. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan harus diolah, dianalisis, dan disajikan dengan cara yang memudahkan pembaca memahami temuan. Tanpa penyajian yang baik, data hanya menjadi kumpulan angka atau teks yang sulit dimaknai.

Penyajian data kuantitatif biasanya dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Tabel berguna untuk menyajikan data detail, sementara grafik dan diagram membantu memperlihatkan tren atau perbandingan. Misalnya, grafik garis dapat menunjukkan perkembangan angka partisipasi sekolah dari tahun ke tahun.

Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi, kutipan langsung dari responden, atau matriks tema. Misalnya, hasil wawancara guru dapat dikutip untuk menggambarkan tantangan dalam implementasi kurikulum. Kutipan ini memberikan suara langsung dari lapangan yang memperkaya laporan.

Analisis data harus mengikuti metode yang telah dijelaskan dalam bab metodologi. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data, sementara statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis kualitatif menggunakan teknik *coding*, kategorisasi, dan tematisasi.

Penting untuk memisahkan antara data mentah dan hasil analisis. Data mentah sebaiknya ditempatkan di lampiran, sementara laporan utama hanya menampilkan data yang telah diolah. Hal ini membuat laporan lebih ringkas namun tetap transparan.

Dalam menyajikan data, evaluator harus menghindari *overload* informasi. Terlalu banyak angka atau kutipan justru membuat pembaca bingung. Data harus dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan evaluasi. Prinsip *less is more* sangat penting dalam penyajian data.

Selain penyajian deskriptif, analisis data harus dikaitkan dengan tujuan program. Misalnya, jika tujuan program adalah meningkatkan kompetensi guru, maka data yang disajikan harus fokus pada perubahan kemampuan guru, bukan aspek lain yang kurang relevan.

Visualisasi data menjadi elemen penting dalam laporan modern. Infografis, bagan interaktif, atau peta tematik dapat digunakan untuk memperjelas temuan. Visualisasi tidak hanya memudahkan pemahaman, tetapi juga membuat laporan lebih menarik.

Penyajian data juga harus memperhatikan audiens. Jika laporan ditujukan untuk pembuat kebijakan, data harus disajikan dalam bentuk ringkasan yang jelas. Jika laporan untuk akademisi, data dapat disajikan lebih detail dengan analisis mendalam.

Selain itu, analisis harus objektif. Evaluator tidak boleh hanya memilih data yang mendukung hipotesis awal, tetapi harus menyajikan seluruh temuan, baik yang sesuai harapan maupun yang bertentangan. Transparansi ini memperkuat kredibilitas laporan.

Dengan penyajian data dan analisis yang baik, laporan evaluasi tidak hanya menjadi dokumen akademis, tetapi juga alat praktis untuk pengambilan keputusan. Data yang jelas, analisis yang mendalam, dan visualisasi yang efektif membuat laporan lebih mudah digunakan.

Dengan demikian, penyajian data dan analisis dalam laporan merupakan elemen krusial yang menentukan sejauh mana laporan evaluasi dapat memberikan dampak nyata terhadap kebijakan pendidikan.

D. Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan dan Pengambil Kebijakan

Rekomendasi merupakan bagian penting dari laporan evaluasi karena berfungsi sebagai jembatan antara temuan evaluasi dengan tindakan nyata. Tanpa rekomendasi, laporan hanya berhenti pada deskripsi masalah tanpa memberikan solusi. Oleh karena itu, penyusunan rekomendasi harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti.

Rekomendasi harus disusun berdasarkan temuan utama evaluasi. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa sekolah kesulitan dalam manajemen dana BOS, maka rekomendasi dapat berupa peningkatan pelatihan administrasi keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara. Dengan cara ini, rekomendasi langsung menjawab masalah yang ditemukan.

Rekomendasi juga harus disesuaikan dengan pemangku kepentingan yang dituju. Untuk pemerintah pusat, rekomendasi bisa berupa perubahan regulasi atau kebijakan nasional. Untuk pemerintah daerah, rekomendasi bisa berupa peningkatan dukungan teknis. Untuk sekolah, rekomendasi bisa berupa perbaikan praktik manajemen.

Bahasa yang digunakan dalam rekomendasi harus operasional, bukan normatif. Alih-alih mengatakan “perlu meningkatkan mutu pendidikan”, rekomendasi

yang baik menyebutkan tindakan konkret seperti "menyediakan modul pelatihan berbasis teknologi untuk semua guru sekolah dasar".

Rekomendasi juga harus mempertimbangkan aspek sumber daya. Saran yang diberikan harus realistis dilaksanakan dengan anggaran, tenaga, dan waktu yang tersedia. Rekomendasi yang tidak realistis hanya akan diabaikan.

Selain itu, rekomendasi sebaiknya diprioritaskan. Evaluator harus menentukan mana rekomendasi yang paling mendesak dan mana yang dapat ditunda. Dengan prioritas, pemangku kepentingan dapat lebih fokus dalam menindaklanjuti.

Rekomendasi juga dapat mencakup strategi implementasi. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan perlunya penguatan literasi digital, rekomendasi dapat disertai saran tentang siapa yang harus bertanggung jawab, jadwal implementasi, dan indikator keberhasilan.

Penyusunan rekomendasi harus mempertimbangkan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berfokus pada perbaikan segera, sementara jangka panjang berfokus pada keberlanjutan program. Kombinasi keduanya memastikan perbaikan yang konsisten.

Rekomendasi juga harus bersifat inklusif. Evaluasi program pendidikan sering melibatkan berbagai kelompok dengan kebutuhan berbeda. Rekomendasi yang mengakomodasi semua pihak lebih mungkin diterima dan dijalankan.

Penyampaian rekomendasi dapat dilakukan dalam bentuk tabel atau poin-poin ringkas untuk memudahkan

pembacaan. Format yang jelas membuat rekomendasi lebih praktis digunakan dalam rapat kebijakan.

Dengan rekomendasi yang berbasis bukti, laporan evaluasi tidak hanya menjadi dokumen akademis, tetapi juga alat strategis yang berpengaruh langsung pada kebijakan pendidikan. Dengan demikian, rekomendasi merupakan bagian esensial yang memastikan hasil evaluasi memberikan kontribusi nyata.

E. Contoh Laporan Evaluasi Program BOS/Merdeka Belajar

Sebagai ilustrasi, evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dijadikan contoh penyusunan laporan evaluasi program pendidikan. Program BOS bertujuan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan sekolah. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

Struktur laporan BOS dimulai dengan ringkasan eksekutif yang menyajikan tujuan, metode, temuan utama, dan rekomendasi. Misalnya, ringkasan dapat menyebutkan bahwa dana BOS berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah sebesar 12% dalam lima tahun terakhir, tetapi masih ada masalah transparansi penggunaan di 15% sekolah.

Metodologi evaluasi menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti kuesioner kepada siswa dan orang tua, wawancara dengan kepala sekolah, observasi penggunaan sarana, serta analisis dokumen laporan keuangan. Sampel diambil dari 100 sekolah di lima provinsi dengan metode stratified random sampling.

Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data kuantitatif menunjukkan tren peningkatan partisipasi sekolah dan perbaikan sarana. Data kualitatif dari wawancara menunjukkan bahwa guru merasa terbantu dengan adanya dana tambahan, meskipun masih ada kendala administratif.

Diskusi hasil menghubungkan temuan dengan teori kebijakan distributif dan literatur internasional tentang pendanaan pendidikan. Diskusi menekankan bahwa meskipun BOS efektif meningkatkan akses, kualitas pengelolaan masih perlu ditingkatkan.

Kesimpulan menyebutkan bahwa BOS berhasil meningkatkan akses pendidikan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas manajemen sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif.

Rekomendasi disusun untuk berbagai pemangku kepentingan. Untuk pemerintah pusat, disarankan memperkuat sistem pelaporan berbasis digital. Untuk pemerintah daerah, perlu meningkatkan supervisi keuangan. Untuk sekolah, perlu pelatihan manajemen keuangan sederhana.

Selain BOS, program Merdeka Belajar juga dapat dijadikan contoh evaluasi. Evaluasi program ini menekankan pada fleksibilitas kurikulum dan kemandirian sekolah. Data dikumpulkan melalui survei guru, wawancara kepala sekolah, serta observasi kelas.

Hasil evaluasi Merdeka Belajar menunjukkan peningkatan kreativitas guru dan kepuasan siswa, tetapi juga mengungkap kesenjangan digital di daerah tertentu. Rekomendasi utama adalah penyediaan infrastruktur digital dan pelatihan literasi teknologi.

Dengan contoh konkret seperti BOS dan Merdeka Belajar, pembaca dapat memahami bagaimana laporan evaluasi disusun secara utuh. Contoh ini juga memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam evaluasi program pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, contoh laporan evaluasi BOS dan Merdeka Belajar menunjukkan bagaimana evaluasi dapat menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kebijakan pendidikan. Laporan yang baik bukan hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Arifin, S., & Muslim, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Era Desentralisasi: Studi pada Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Kebijakan Pendidikan, 10*(2), 115–130. https://doi.org/10.21009/jkp.102.03

Aswandi, A., & Sa'ud, U. S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 29*(1), 45–59.

Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Budiati, I. (2019). *Metode Penelitian Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Darmawan, I. P. A., & Utami, N. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus di Bali. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 15*(1), 23–38.

Dunn, W. N. (2022). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (7th ed.). New York: Routledge.

Dye, T. R. (2020). *Understanding Public Policy* (16th ed.). New York: Pearson.

Febriana, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Merdeka Belajar terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 9*(2), 88–102.

Fitriyani, D. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah: Perspektif Efektivitas dan Akuntabilitas. *Jurnal Evaluasi Pendidikan, 11*(1), 55–70.

Handayaningrat, S. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2020). *Manajemen Pendidikan Nasional Berbasis TI*. Jakarta: Prenada Media.

Kemendikbudristek. (2021). *Kebijakan Merdeka Belajar dan Transformasi Kurikulum*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

OECD. (2019). *Education Policy Outlook: Indonesia*. Paris: OECD Publishing.

Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2020). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (4th ed.). New York: Routledge.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Satori, D., & Komariah, A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sirozi, M. (2019). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Kritis. *Jurnal Pendidikan Islam, 8*(1), 1–20.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, H. B., & Arifin, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 27*(3), 311–328.

Tilaar, H. A. R. (2017). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

UNESCO. (2022). *Education for Sustainable Development: Policy Review for Southeast Asia*. Paris: UNESCO Publishing.

Vedung, E. (2021). *Public Policy and Program Evaluation*. London: Routledge.

Widiastuti, I. (2025). Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia: Challenges, Achievement, and Future Direction. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 17*(2), 1955–1964. https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.6803

TENTANG PENULIS

Sunanto, S.Pd., lahir di Indramayu, 12 Maret 1991, anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Surya dan Ibu Danisa. Pendidikan dimulai dari SDN Bunder 2 Indramayu, kemudian SMP Negeri 2 Lelea Indramayu, serta SMK Negeri 1 Lelea Indramayu.

Kecintaannya pada dunia ilmu pengetahuan membawanya lulus S-1 PPKn, FKIP Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, dan melanjutkan S-2 Magister Manajemen Pendidikan di universitas yang sama.

Ia bekerja sebagai *Customer Service* di Gedung Office Gandaria City Jakarta (2013–2021), dan sejak 2021 bekerja sebagai *Customer Service* di Gedung Apartemen Pakubuwono Jakarta.

Dengan latar pendidikan kependidikan dan pengalaman panjang dalam bidang pelayanan, ia dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, disiplin, dan berkomitmen tinggi. Melalui karya tulis dan pengabdiannya, ia berupaya memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan sekaligus mencerminkan pentingnya etos kerja, profesionalisme, dan nilai-nilai humanis dalam kehidupan sehari-hari.

Darman Eka Saputra, S.Pd., Gr., adalah seorang guru, penulis, dan pemerhati pendidikan yang lahir di Cianjur, Jawa Barat. Ia menempuh pendidikan di SDN Sukaresmi Cikalongkulon, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tanjungsari Bogor dan SMA Negeri 1 Cariu Bogor.

Kecintaannya pada dunia pendidikan membawanya melanjutkan studi S1 PPKn STKIP Pasundan Bandung, serta S-1 PGSD Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Sebagai wujud profesionalisme, ia menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Padang. Saat ini sedang menempuh program pascasarjana Magister Pendidikan (M.Pd.) dalam bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Ia juga aktif mengajar di SDN Sukaresmi Cikalongkulon sekaligus produktif menulis buku, artikel, dan modul pembelajaran. Karyanya banyak mengangkat isu-isu kebijakan pendidikan, profesionalisme guru, evaluasi program, serta tantangan pendidikan abad ke-21.

Dengan latar akademik yang kuat dan pengalaman praktik yang luas, ia berkomitmen menghadirkan pendidikan yang lebih bermakna, inovatif, dan humanis bagi generasi muda Indonesia.

Buku ini menghadirkan kajian komprehensif mengenai kebijakan publik dan evaluasi program pendidikan dengan pendekatan teoritis sekaligus praktis. Disusun secara sistematis dalam 10 bab, buku ini mengupas mulai dari konsep dasar kebijakan publik, proses perumusan dan implementasi kebijakan, jenis-jenis kebijakan dalam pendidikan, hingga metode dan desain evaluasi program yang aplikatif.

Pembaca akan diajak memahami keterkaitan antara teori kebijakan publik, regulasi pendidikan, dan praktik di lapangan, serta dilengkapi dengan contoh nyata kebijakan di Indonesia, seperti program BOS dan Merdeka Belajar. Buku ini juga menguraikan berbagai teknik analisis kebijakan, strategi evaluasi program, hingga contoh penyusunan laporan evaluasi yang dapat langsung diadaptasi oleh akademisi maupun praktisi.

Ditulis dengan bahasa akademis yang mudah dipahami, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, guru, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan yang ingin memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dibentuk, diimplementasikan, serta dievaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan kombinasi teori mutakhir, metode evaluasi berbasis bukti, dan praktik lapangan, buku ini hadir sebagai panduan strategis bagi siapa saja yang peduli pada perbaikan sistem pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

Penerbit Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim
Jorong Pale, Pematang Panjang, Sijunjung
Sijunjung, Sumatera Barat – Indonesia 27554
Email : cendekiamuslimpress@gmail.com
Website : www.cendekiamuslim.com

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

PENDIDIKAN
ISBN 978-634-219-244-5
9 786342 192665